

**PENGARUH INFLASI DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN  
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA**

**FAHMI ARDIANSYAH**

**8105102886**



**Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan  
gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI  
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2015**

**THE EFFECT OF INFLATION AND INVESTMENT TO INCOME  
INEQUALITY DISTRIBUTION IN INDONESIA**

**FAHMI ARDIANSYAH**

**8105102886**



**This Skripsi is Written to**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI  
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2015**

## **ABSTRAK**

**FAHMI ARDIANSYAH. *Pengaruh Inflasi dan Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia*. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2015.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah inflasi dan investasi memiliki pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2007-2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *Time Series* dari tahun 2008-2012 dan *cross section* berjumlah 33 Provinsi di Indonesia, dengan metode *ex post facto*. Data di sajikan setiap tahun yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) serta BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang diperoleh persamaan hasil *fixed effect*  $INE = 0,142 - 0,002 INF + 0,008 LnINV$ . Berdasarkan hasil analisis secara simultan, inflasi dan investasi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis secara parsial, inflasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dan investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Variasi pengaruh dari kedua variabel bebas dapat diketahui berdasarkan nilai  $R^2$  sebesar 0,57. Sehingga, 57% variasi ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh inflasi dan tingkat investasi dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: *inflasi, investasi, ketimpangan distribusi pendapatan*

## ***ABSTRACT***

**FAHMI ARDIANSYAH. The Effect of Inflation and Investmet to Income Inequality Distribution in Indonesia. Education of Cooperative Economics, Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2014.**

This research aimed to determine whether the inflation and investment has an influence to the income inequality distribution in Indonesia. The research used expo facto method, by using panel data which combines time series of the years 2007-2012 and cross section of 33 province in Indonesia. The data which presented each year obtained from BPS (Central Bureau of Statistics). This research used panel data regression model obtained *fixed effect* equation results  $INE = 0,142 - 0,002 INF + 0,008 LnINV$ . Based on the simultan analysis, the inflation and investment affect significantly to the income inequality in Indonesia. Based on the results of partial analysis, the inflation affect negative significantly to the income inequality distribution, and investment affect positive significantly against the income inequality distribution. Influence variations of two independent variables can be determined based on the R2 value of 0.57. Thus, 57% variation in the level of income inequality was affected by the inflation and investment while remaining were influenced by other factors outside the research model.

Keywords: Investment, Inflation, Income Equality Distribution

## MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga (HR. Muslim)

Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahap pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, dia akan tawadu'. Dan jika memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. (Umar bin Khattab)

*Action is the Foundational key to all success (Pablo Picasso)*

Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki (Mahatma Gandhi)

*This skripsi i would present to,  
My Beloved Parents for their endless love and their support, for my lovely sisters  
for their helped, and my loved one who stay with me in my hardest time.*

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tidak akan membayar semua yang telah diberikan.

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab**  
**Dekan Fakultas Ekonomi**



Drs. Dedi Purwana ES, M. Bus  
NIP. 196712071992031001

Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. <u>Dr. Saparuddin M, SE, M.Si</u> NIP. 19770115200501101	Ketua		16/2/15
2. <u>Dr. Harya Kuncara, SE, M.Si</u> NIP. 197002072008121001	Penguji Ahli		17/2/15
3. <u>Dicky Iranto, SE, M.Si</u> NIP. 197106122001121001	Sekretaris		13/2/15
4. <u>Dra.RD.Tuty Sariwulan, M.Si</u> NIP. 195807221986032001	Pembimbing I		17/2/15
5. <u>Karuniana Dianta A.S, M.E</u> NIP. 198009242008121002	Pembimbing II		17/2/15

Tanggal Lulus :

27 Januari 2015

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 23 Januari 2015

Peneliti,



Fahmi Ardiansyah

No. Reg. 8105102886

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang mengalir begitu banyak, penuh kemuliaan selaras dengan kemuliaan dan keagungan-Nya, Pemilik segala ilmu. Dengan perjuangan yang tak kenal henti serta diiringi doa maka skripsi ini yang berjudul Pengaruh Inflasi dan Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan selama kurang lebih 6 bulan. Sekaligus juga untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah skripsi. Serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis. Maka, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Tuty Sariwulan, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing, memberi masukan dan mengarahkan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
  
2. Bapak Karuniana Dianta A. Sebayang, S.IP, M.E selaku dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing, memberi masukan dan mengarahkan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
  
3. Bapak Drs. Dedi Purwana, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Jakarta.

4. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE., M. Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Bapak Drs. Nurdin Hidayat, M.M, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Bapak Karuniana Dianta A. Sebayang, S.IP, M.E selaku ketua konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi Universitas Negeri Jakarta
5. Yang paling utama, bagi kedua Orang Tua Saya serta kedua kakak kandung penulis yang dengan setulus hati senantiasa mendoakan saya, memberikan perhatian, dan dukungan baik moril maupun materil selama mengerjakan skripsi ini.
6. Teman terdekat saya, Choirunnisa Helmianto, S.Pd selama proses penelitian ini yang selalu mendampingi, mendoakan, serta menyemangati hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Tutor LCC Rawamangun yang memberikan semangat dan doanya agar terselesaikannya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Tamsol FC yang selalu memberikan hiburan, memberikan doa, serta semangatnya disaat penulis sedang mengalami kendala dalam penelitian skripsi ini.

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Perumusan Masalah .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
 <b>BAB II KERANGKA TEORITIK</b>	
A. Definisi Konseptual .....	9
1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan .....	9
2. Inflasi .....	22
3. Investasi .....	29
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	37

C. Kerangka Teoritik .....	40
D. Perumusan Hipotesis .....	45

### **BAB III Metodologi Penelitian**

A. Tujuan Penelitian .....	46
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian .....	46
C. Metode Penelitian .....	47
D. Jenis dan Sumber Data .....	47
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	48
F. Teknik Analisis Data .....	49

### **BAB IV Pembahasan**

A. Deskripsi Data .....	60
1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan .....	60
2. Inflasi .....	64
3. Investasi .....	66
B. Pengujian Hipotesis .....	69
1. Pemilihan Model Terbaik .....	69
a. Pengujian Signifikansi <i>Common Effect/Fixed Effect</i> .....	69
b. Pengujian Signifikansi <i>Fixed Effect/Random Effect</i> .....	70
2. Uji Asumsi Klasik .....	71
a. Uji Normalitas .....	71
b. Uji Heteroskedastisitas .....	72
c. Uji Multikolinearitas .....	72
3. Uji Hipotesis .....	73
a. Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji t) .....	73
b. Uji Keberartian Regresi (Uji F) .....	75
c. Koefisien Determinansi .....	76
C. Pembahasan .....	76
D. Keterbatasan Penelitian .....	84

**BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Saran**

A. Kesimpulan ..... 85  
B. Implikasi ..... 85  
C. Saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA ..... 87**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... 89**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: PMA, PMDN, Inflasi, Rasio Gini di Indonesia .....	6
Tabel II.1	: Nilai Rasio Gini .....	19
Tabel III.1	: Pengujian Signifikansi Model Panel .....	53
Tabel IV.1	: Pengujian <i>Common Effect/Fixed Effect</i> .....	69
Tabel IV.2	: Pengujian <i>Fixed Effect/Random Effect</i> .....	70
Tabel IV.3	: Uji Heteroskedastisitas Breusch Pagan-Godfrey .....	72
Tabel IV.4	: Uji Multikolinearitas .....	73
Tabel IV.5	: Uji t .....	73
Tabel IV.6	: Uji F .....	75
Tabel IV.7	: <i>Intercept</i> .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kurva Lorenz .....	17
Gambar IV.1 : Uji Normalitas .....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 : Indeks Gini Per Provinsi di Indonesia .....	90
Lampiran 2 : Data PMDN Per Provinsi di Indonesia .....	91
Lampiran 3 : Data PMA Per Provinsi di Indonesia .....	92
Lampiran 4 : Data Inflasi Per Provinsi di Indonesia .....	93
Lampiran 5 : Uji Normalitas .....	94
Lampiran 6 : Uji Heteroskedastisitas .....	95
Lampiran 7 : Uji Multikolinearitas .....	95
Lampiran 8 : <i>Fixed Effect Test</i> .....	96
Lampiran 9 : Uji Chow .....	97
Lampiran 10 : Uji Hausman .....	99
Lampiran 11 : Data Olah Eviews 1 .....	100
Lampiran 12 : Data Olah Eviews 2 .....	106
Lampiran 13 : Laju PDRB (Persen) .....	108
Lampiran 14 : Laju PDRB (Milyar Rupiah) .....	109

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan penanggulangan kemiskinan. Di beberapa negara, tujuan tersebut masih menjadi dilema apakah sebuah negara tersebut ingin mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau mengurangi distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum jaminan akan ketidakmerataan distribusi pendapatan akan rendah.

Sudah menjadi suatu hal yang lazim di banyak negara berkembang, terutama negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula.

Distribusi pendapatan nasional merupakan sebuah unsur untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia. Di Indonesia, kita hanya menjadi *market* bagi perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di negara ini dan pengusaha asal Indonesia menjadi kaum yang paling dirugikan karena keberpihakan pemerintah tersebut. Tercatat, 90% perekonomian kita dikuasai asing dan sisanya adalah pengusaha Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia masih mengalami sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan. Demikian pula, untuk meningkatkan aliran investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perlu diimbangi dengan kecepatan dan kemudahan perizinan<sup>2</sup>.

Investasi di Indonesia yang terjadi ada dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Tahun 2007 mencapai angka Rp 20.363,4 Milyar. Kemudian dari tahun 2009 hingga tahun 2012 realisasi penanaman modal dalam negeri terus mengalami peningkatan dari Rp 37.799,9 Milyar hingga yang terakhir mencapai angka Rp 92.182,0 Milyar.

Jumlah investasi yang dilakukan investor dalam negeri tidak hanya direkap keseluruhan dalam satu negara. Mereka juga melakukan investasi di daerah-daerah

---

<sup>1</sup>Novrizal Sikumbang-90 Persen Perekonomian Indonesia Dikuasai Asing  
<http://www.aktual.co/hukum/17323190-persen-perekonomian-indonesia-dikuasai-asing-> (diakses pada Selasa, 13 Mei 2014, pukul 13.30 WIB)

<sup>2</sup>Zul Sikumbang-Indonesia masih alami masalah soal investasi dan hukum  
<http://www.antaraneWS.com/berita/328050/indonesia-masih-alami-masalah-soal-investasi-dan-hukum> (diakses pada 13 Mei 2014 pukul 13.00 WIB)

yang masih kurang untuk menjadi pusat pertumbuhan. Tercatat, dalam realisasi investor dalam negeri, masih banyak yang terjadi di pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Pulau lain yang dijadikan pusat investasi dalam negeri masih kurang diminati.

Jumlah penanaman modal yang dilakukan investor asing di Indonesia juga sangat besar dan meningkat setiap tahunnya. Investasi yang dilakukan oleh investor asing yang terjadi di dalam negeri juga terus meningkat setiap tahunnya. Data dalam tabel 1.1 juga menunjukkan realisasi jumlah PMA dari tahun 2007-2012. Tahun 2008 mencapai angka US\$ 14871,4 dan terus naik hingga tahun 2012 mencapai angka US\$ 24564,7.

Investor asing tampaknya masih sulit untuk melakukan investasi di luar pulau Jawa. Tercatat, di enam provinsi pulau Jawa investasi yang dilakukan investor masing masih sangat besar terutama di provinsi DKI Jakarta yang mencapai angka diatas 3000 juta US\$ dibandingkan dengan pulau lain. Alasan utama tentu karena DKI Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia, di Jakarta pula menjadi pusat pemerintahan dan juga ada pusat industri.

Inflasi juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Inflasi di Indonesia menunjukkan angka yang fluktuatif hampir setiap tahunnya. Dari data BPS, mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2007 inflasi di Indonesia terus menunjukkan naik turun. Sejalan dengan naik turunnya inflasi dalam jangka menengah 2007-2012, Bank Indonesia akan mulai menurunkan tingkat BI Rate secara gradual. Sinergi antara komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro selain memberi

dampak positif terhadap sisi penawaran, juga memberi dampak positif terhadap sisi permintaan.

Fenomena fluktuatif tersebut disebabkan oleh beberapa hal, beberapa diantaranya adanya krisis global yang terjadi pada tahun 2008, serta dampak dari diselenggarakannya pemilu pada tahun 2009. Hal-hal yang terjadi tersebut menuntut pemerintah untuk membuat suatu sinergi dari kebijakan baik secara fiskal maupun moneter, guna menstabilkan perekonomian. Inflasi secara nasional yang fluktuatif juga terjadi di semua provinsi. Tercatat dari tahun 2007-2012 hampir setiap provinsi di Indonesia mengalami inflasi secara naik turun.

Permasalahan pertambahan penduduk telah menjadi prioritas kebijakan dalam pembangunan di Indonesia. Diawali dengan perhatian pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk. Pemahaman yang berbeda terhadap perubahan penduduk serta faktor-faktor yang terkait dengannya memiliki pengaruh yang berbeda juga kepada kebijakan pemerintah.

Jumlah penduduk akan mempengaruhi distribusi pendapatan karena akan mempengaruhi kesempatan kerja dan upah. Semakin banyak penduduk akan mengakibatkan pendapatan perkapita yang tinggi<sup>3</sup>. Menurut data BPS, sensus penduduk yang dilakukan tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa<sup>4</sup>. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk

---

<sup>3</sup> Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, p.147

<sup>4</sup> Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010  
[http://bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=12&notab=1](http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1) (diakses pada Selasa, 13 Mei 2014, pukul 13.30 WIB)

sendiri dari hasil sensus tersebut mencapai angka 1,49%. Namun dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak dengan laju pertumbuhan penduduk yang termasuk cukup tinggi di Indonesia belum dibarengi dengan tingginya kesempatan kerja dan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Faktor lain yang menyebabkan masih timpangnya distribusi pendapatan salah satunya dengan memburuknya nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing. Negara sedang berkembang seperti Indonesia yang melakukan perdagangan dengan negara lain termasuk dengan negara maju, mengakibatkan permintaan barang-barang ekspor menjadi tidak elastis.

Rendahnya mobilitas sosial juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Minimnya perpindahan penduduk menjadikan sebuah masyarakat yang ada di daerah tertinggal sulit untuk maju hingga mengakibatkan ketimpangan.

Pelaksanaan kebijakan industri yang masih dilakukan pemerintah untuk melindungi golongan kapitalis. Dengan dilindunginya golongan kapitalis, membuat mereka semakin berkuasa dengan terus menambah kekayaan tanpa memikirkan masyarakat lain yang masih tertinggal.

Salah satu metode statistik yang umum digunakan untuk mengestimasi sejauh mana pencapaian tingkat pemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi ialah dengan mengukur nilai koefisien atau rasio gini. Nilainya antara 0 dan 1, semakin mendekati 1 semakin timpang distribusi pendapatannya, begitupun

sebaliknya semakin mendekati angka 0, maka ketimpangan suatu negara akan rendah.<sup>5</sup>

Ketimpangan di Indonesia dari tahun 2007-2012 dengan menggunakan indeks koefisien gini terlihat meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2007 mencapai angka 0,36 kemudian empat tahun setelahnya terus meningkat di tiap tahunnya menjadi 0,37 dan 0,38 kemudian yang terakhir mencapai angka 0,413. Sebuah angka yang cukup besar, namun proses pembangunan yang dilakukan pemerintah masih bisa dilakukan.

Pada tabel 1.1 dibawah ini menjelaskan bahwa dari tahun 2007-2012 semakin meningkatnya investasi dan juga inflasi namun tidak diikuti dengan meratanya ketimpangan distribusi pendapatan. Data investasi ada dua macam yaitu PMA dan PMDN dan dalam tabel 1.1 PMA serta PMDN disajikan dalam mata uang rupiah dimana PMA menggunakan kurs tengah untuk dijadikan rupiah.

**Tabel 1.1. Investasi, Inflasi, dan Koefisien Gini di Indonesia**

No	Keterangan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	PMA	10341,4	14871,4	10815,2	16214,8	19474,5	24564,7
2	PMDN	34878,7	20363,4	37799,8	60626,3	76000,70	92182,0
3	Inflasi	7,22	12,21	3,33	7,19	4,01	4,48
4	Rasio Gini	0,36	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (Data Diolah)

<sup>5</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* p. 151

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan diatas, maka beberapa faktor yang mempengaruhi distribus pendapatan adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh nilai tukar terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh rendahnya mobilitas sosial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
6. Apakah terdapat pengaruh kebijakan industri yang dilakukan pemerintah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?

## **C. Pembatasan Masalah**

Menurut identifikasi masalah diatas, ternyata masalah ketimpangan distribusi pendapatan memiliki penyebab yang sangat luas dan kompleks. Dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dari segi dana, waktu, dan tenaga, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah “Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia”

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. “Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia?”
2. “Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia?”
3. “Apakah terdapat pengaruh Investasi dan Inflasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia?”

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perekonomian, serta sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh dari investasi dan inflasi serta implikasinya terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pemerintah dalam menentukan arah dan strategi pembangunan di masa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam mengantisipasi pelaksanaan pembangunan ekonomi bangsa.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIK**

#### **A. Definisi Konseptual**

##### **1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total, pemerataan pendapatan dan naiknya pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Menurut Myrdal (1957) ketimpangan distribusi pendapatan adalah perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan mengakibatkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi bagi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) yang dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan.<sup>1</sup>

Myrdal menambahkan, berikut ini hal-hal yang menyebabkan ketimpangan regional di negara berkembang :

---

<sup>1</sup> Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), p. 268-275

1. Dampak balik perpindahan modal  
Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, per,imyaan yang meningkat akan merangsang investasi. Apabila sistem perbankan tidak diatur untuk bertindalmaka cenderung menjadi alatpenyedot tabungan dari wilayah yang miskin ke wilayah yang lebih kaya.
2. Dampak balik migrasi  
Daerah dan wilayah tempat kegiatan ekonomi berkembang akan menarik orang-orang muda dan aktif. Ini cenderung akan menguntungkan wilayah berkembang dan akan menekan kegiatan ekonomi wilayah terbelakang tempat asal buruh tersebut.
3. Perdagangan  
Perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan kurang maju, sehingga akan menyebabkan ketimpangan regional.
4. Peranan pemerintah  
Kebijaksanaan nasional di negara miskin cenderung memperburuk ketimpangan regional. Peranan bebas kekuatan pasar dan kebijaksanaan liberal merupakan dua kekuatan yang menciptakan ketimpangan regional sebagai akibat lemahnya dampak sebar.
5. Lembaga feodal yang kokoh dan lembaga lainnya yang membantu si kaya mengisap si miskin.

Menurut Myrdal, ketidakmerataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan ini berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar, hal ini menurut Myrdal dikarenakan oleh peranan bebas kekuatan pasa, yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan regional. Jika segala sesuatunya diserahkan pada kekuatan pasar, tanpa diiringi oleh intervensikebijakan apapun, maka produksi, industri, perdagangan, perbankan, dan hampir semua kegiatan ekonomi yang di dalam suatu perekonomian sedang berkembang yang cenderung mendatangkan keuntungan akan mengelompokkan daerah padat modal tersebut meninggalkan daerah lain yang masih kurang modal menjadi wilayah yang terbelakang.

Bigsten (1987) mengemukakan bahwa distribusi pendapatan pada sebuah perekonomian adalah hasil akhir dari seluruh proses ekonomi, yang artinya bahwa distribusi pendapatan pada prinsipnya harus memperhitungkan semua yang mempengaruhinya. Pandangan tradisional tentang ketimpangan berpendapat bahwa ketimpangan merupakan kondisi yang diperlukan dan insentif yang baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah. Adam Smith dan Karl Marx berpendapat bahwa persoalan pokok dari distribusi pendapatan adalah bagaimana hasil penjualan produk dibagi dengan diantaranya upah, sewa, dan laba.

Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.<sup>2</sup> Distribusi pendapatan juga merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini menggunakan data pengeluaran.<sup>3</sup>

Ketimpangan menurut Mudrajat Kuncoro mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab ketimpangan antar wilayah yaitu adanya perubahan faktor anugerah awal (*endowment factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan

---

<sup>2</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1999), p. 53

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan*, p. 40

tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga memunculkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.<sup>4</sup>

Alesina dan Rodik menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini dikarenakan ketimpangan akan mempunyai kebijakan redistribusi pendapatan yang tentunya akan mahal.<sup>5</sup>

Todaro dan Smith<sup>6</sup> menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal antara lain :

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi.
2. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan stabilitas sosial dan solidaritas.
3. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap tidak adil.

Kuznets mempunyai teori yang dikenal dengan “U Terbalik” yang artinya pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan memang terlihat buruk, namun pada tahapan berikutnya akan menjadi lebih baik dan akan kembali seperti semula karena siklus ekonomi yang selalu terjadi<sup>7</sup>.

Pada teori Kuznets ini, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan terlihat bisa dicapai bersama. Pada awal mula siklus ekonomi terjadi, pertumbuhan

---

<sup>4</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi : Teori Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), p.84

<sup>5</sup> Alesina, Rodik, *Distributive Politics and Economic Growth*. The Quarterly Journal of Economics p465-490

<sup>6</sup> Todaro and Smith, *op. cit.* P.228

<sup>7</sup> Michael Todaro, *Op. Cit*

ekonomi dan distribusi pendapatan memang masih rendah. Seiring berjalannya waktu, adanya *transfer* yang berasal dari sektor tenaga kerja yang produktivitasnya rendah ke sektor yang produktivitasnya tinggi. dengan demikian, adanya kesenjangan antar sektor maka secara substansial akan menaikkan kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor. Pada kondisi ini, pertumbuhan ekonomi sudah mulai naik. Kondisi ini akan terus terjadi karena siklus ekonomi. Pada awal pertumbuhan, distribusi pendapatan masih rendah, kemudian saat pertumbuhan naik, distribusi pendapatan juga mulai naik. Adanya siklus ekonomi dimana pada saat sudah mencapai titik maksimal, keadaan ekonomi akan kembali seperti awal membuat pertumbuhan dan distribusi pendapatan kembali menurun. Kondisi ini akan berlanjut terus menerus di tiap-tiap negara.

Sedangkan menurut Lewis mengkaitkannya dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Tahapan pertumbuhan berpusat pada kegiatan industri modern. Pada tahap ini, lapangan pekerjaan terbatas namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Ketimpangan pendapatan antara sektor industri modern dengan sektor pertanian tradisional pada awalnya akan melebar dengan cepat sebelum menyempit kembali pada akhirnya<sup>8</sup>.

Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah penyaluran (pembagian atau pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama di masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Sedangkan pendapatan yaitu hasil kerja dari usaha.

---

<sup>8</sup> ibid

Ketimpangan pendapatan nasional, terdapat tiga masalah yang terjadi di suatu negara, seperti<sup>9</sup> :

1) Ketidakmerataan Pendapatan Nasional

Distribusi pendapatan dapat ditelaah menggunakan angka-angka menurut kriteria Bank Dunia. Bank Dunia membagi masyarakat dalam tiga lapisan pendapatan, yaitu 40% penduduk yang berpendapatan rendah, 40% penduduk yang berpendapatan menengah, dan 20% penduduk yang berpendapatan tinggi. Kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia cukup memberikan bagaimana gambaran secara umum bagaimana ketimpangan nasional di sebuah negara.

2) Ketidakmerataan Pendapatan Spasial

Ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi di spasial juga terjadi atau antar daerah perkotaan dan pedesaan. Di Indonesia, pemerataan pendapatan lebih merata di daerah pedesaan dibandingkan di perkotaan. Porsi pendapatan yang dinikmati oleh lapisan 40% masyarakat berpendapatan terendah di desa senantiasa meningkat setiap tahunnya. Tidak demikian halnya dengan masyarakat yang tinggal di kota. Dibandingkan dengan desa, pemerataan pendapatan sangat terlihat timpangnya di kota.

Ketidakmerataan tidak hanya dari distribusinya saja namun juga besaran pendapatannya. Disini dapat terlihat dengan cara membandingkan jumlah penduduk dan jumlah pendapatannya. Jumlah penduduk di pedesaan yang

---

<sup>9</sup> Dumairy, *op. cit.* p. 56-60

berpendapatan rendah relatif besar. Sedangkan dengan penduduk desa yang berpendapatan tinggi relatif lebih kecil.

### 3) Ketidakmerataan Pendapatan Regional

Dilihat secara regional, ketidakmerataan juga terjadi pada wilayah-wilayah di Indonesia. Jadi, tingkat pendapatan di wilayah yang satu dengan wilayah lainnya berbeda yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan cenderung lebih merata di luar pulau Jawa. Dalam hal tingkat pendapatannya sendiri, terdapat perbedaan cukup mencolok diantara wilayah-wilayah di tanah air. Hal ini dapat dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto Per kapita antar propinsi.

#### **a. Penggolongan Distribusi Pendapatan**

Distribusi pendapatan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu distribusi pendapatan fungsional dan distribusi pendapatan antar kelompok.<sup>10</sup>

##### a) Distribusi Pendapatan Fungsional

Ukuran distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pembagian pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal). Di samping memandang individu-individu sebagai kesatuan yang terpisah, distribusi pendapatan fungsional tersebut menyelidiki persentase yang diterima tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan persentase dan pendapatan nasional yang terdiri dari sewa, bunga dan laba.

---

<sup>10</sup> Todaro, *op. cit*, p. 234-240

## b) Distribusi Pendapatan Kelompok

Pendekatan distribusi antar kelompok dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni distribusi pendapatan mutlak dan distribusi pendapatan relatif. Distribusi pendapatan mutlak berkaitan dengan proporsi jumlah penduduk yang pendapatannya dapat mencapai suatu tingkat tertentu atau bisa lebih kecil. Sementara distribusi pendapatan relatif menunjukkan perbandingan pendapatan yang diterima oleh berbagai kelompok atau kelas distribusi pendapatan.

### **b. Pengukuran Distribusi Pendapatan**

Daimon dan Thorbecke menyebutkan beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik, yaitu <sup>11</sup> :

- a) Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah.
- b) Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*).
- c) Simetris. Jika antar penduduk bertukar tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan.
- d) Sensitif transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya dan si miskin akan menurunkan ketimpangan.

Beberapa pengukuran tentang distribusi pendapatan antara lain :

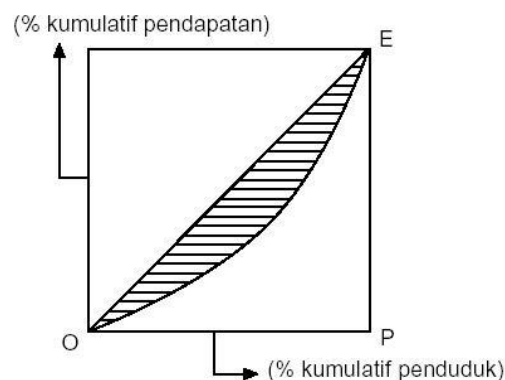
---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik, Op. Cit, p. 44

a. Kurva Lorenz

Dinamakan kurva Lorenz adalah karena yang memperkenalkan kurva tersebut adalah Conrad Lorenz seorang ahli statistika dari Amerika Serikat. Pada tahun 1905 dia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk pada sisi datarnya dan pendapatan mereka pada sisi tegaknya.

Kurva ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.<sup>12</sup>



**Gambar II.1 Kurva Lorenz**

**Sumber : Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* Hal. 152**

Gambar diatas menunjukkan sumbu horisontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima masing-masing persentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah biasa disebut “garis pemerataan sempurna”. Karena setiap

<sup>12</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, p.152

titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan.

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal maka semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya, semakin dekat jarak kurva Lorenz dari diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar diatas, besarnya ketimpangan digambarkan dengan daerah yang diarsir.

#### b. Indeks atau Rasio Koefisien Gini

Koefisien gini diambil dari nama ahli statistik Italia yang bernama C. Gini yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran koefisien rasio gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila gini rasionya mendekati angka nol itu berarti ketimpangan yang ada di daerah tersebut rendah dan sebaliknya apabila koefisien gini mendekati satu, maka ketimpangan terlihat tinggi.

Secara konseptual, pendekatan analisis distribusi pendapatan dikemukakan dalam 5 hal syarat pokok analisis distribusi telah terpenuhi dimana :

1. Koefisien gini tidak bergantung pada nilai rata-rata. Setiap perubahan secara proporsional antar golongan pendapatan tidak berpengaruh pada distribusi pendapatan, mengingat sebagai acuan analisisnya adalah kelompok pendapatan.
2. Koefisien gini tidak tergantung pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk sebagai objek analisis namun tidak mempengaruhi nilai

koefisien gini, kelompok pendapatan merupakan acuan dasar analisisnya.

3. Koefisien gini bersifat simetris. Perubahan lokasi objek analisis tidak serta merta merubah koefisien gini pendapatan secara agregat, namun hal tersebut dapat merubah koefisien gini pada golongan pendapatan tertentu di wilayah tertentu jika perubahan lokal objek analisis cukup besar,
4. Koefisien gini dapat didekomposisi. Pengelompokan objek analisis berdasarkan latar belakang atau dimensi tertentu dapat dilakukan, misalnya dimensi ketenagakerjaan, pendidikan maupun dimensi lainnya.
5. Koefisien gini dapat diuji secara statistik. secara statistik untuk memperoleh nilai koefisien gini yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ialah dengan menerapkan *confidence interval* sebesar 95%. Teknik *bootstrapping interval* dapat dilakukan untuk kebutuhan tersebut

Berikut tabel 2.1 menunjukkan ketimpangan menurut indeks rasio gini.<sup>13</sup>

**Tabel II.I**  
**Nilai Rasio Gini**

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat ketimpangan Sedang
>0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

<sup>13</sup> Lincoln Arsyad, op. cit. P. 147

Pengukuran distribusi pendapatan dengan memakai koefisien gini berbasis pada kurva lorenz. Berdasarkan kurva lorenz, maka koefisien gini bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut<sup>14</sup>.

$$\text{Koefisien Gini} = \frac{\text{Daerah Arsir A}}{\text{Luas } \Delta \text{BCD}}$$

Dengan menggunakan rumus diatas, nilai rasio gini dapat dihitung dari kurva lorenz, dimana daerah arsir A adalah yang berada antara garis tingkat pemerataan sempurna dengan garis kurva lorenz (yang membentuk sudut 45 derajat dari titik O). Sedangkan luas  $\Delta$  BCD adalah daerah segitiga antara garis pemerataan tersebut. Jika hasil hitungannya mendekati nol, maka ketimpangan di daerah tersebut rendah, sebaliknya jika hasil hitungannya mendekati angka satu, maka tingkat ketimpangannya tinggi.

### c. Indeks Williamson

Diperkenalkan oleh Williamson dalam tulisannya tahun 1965 merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional dengan tingkat pembangunan ekonomi.<sup>15</sup> Dalam hubungannya dengan pembangunan adalah, disparitas regional menjadi lebih besar dan hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja. Secara matematis perhitungan Indeks Williamson adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

$Y_i$  = PDRB perkapita di Kabupaten/kota i

$Y$  = PDRB perkapita di Provinsi i

$f_i$  = Jumlah penduduk di kabupate/kota i

$n$  = Jumlah penduduk di Provinsi i

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> Kuncoro, Mudrajad Op. Cit. P.133

Hasil perhitungan dari rumus Williamson positif dan berkisar antara nol sampai dengan satu. Dimana jika hasil perhitungannya mendekati angka nol, maka tingkat ketimpangan di daerah tersebut rendah. Sebaliknya jika hasil perhitungan mendekati angka satu, maka tingkat ketimpangan di daerah tersebut rendah.

Oshima menetapkan kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, apakah ada ketimpangan tinggi, sedang, atau rendah, dimana<sup>16</sup> :

- Ketimpangan Tinggi jika  $IW > 0,5$
- Ketimpangan Sedang jika  $IW = 0,35 - 0,5$
- Ketimpangan Rendah jika  $IW < 0,35$

#### d. Kriteria Bank Dunia

Bank dunia juga mengelompokkan penduduk sesuai dengan tingkat pendapatannya menjadi<sup>17</sup> :

1. Penduduk dengan pendapatan rendah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk
2. Penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk
3. Penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk

Ketimpangan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% tersendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

---

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah*, 2000

<sup>17</sup> Lincoln Arsyad, op. cit. P. 148

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah perbedaan tingkat perekonomian antar daerah dalam suatu negara karena pemusatan kegiatan perekonomian di pusat kota yang menyebabkan terjadinya perbedaan standar hidup serta pendapatan pada lapisan masyarakat.

## 2. Inflasi

Inflasi yang merupakan suatu gejala dimana terjadinya peningkatan harga secara bersamaan (umum) secara terus-menerus memiliki tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yakni: kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus.<sup>18</sup> Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, demikian pula kenaikan harga yang bersifat sementara juga bukan inflasi (contoh; kenaikan harga beras pada musim paceklik/menjelang panen)<sup>19</sup>.

Lipsey, Steiner dan Purvis mengatakan, “Inflasi adalah tingkat persentase kenaikan dalam beberapa indeks harga dari satu periode lainnya.”<sup>20</sup>

Inflasi dalam suatu periode mengakibatkan kenaikan harga barang secara umum yang mengakibatkan para pekerja yang mempunyai pendapatan tetap akan terbebani. Dengan mempunyai pendapatan yang tetap, mereka menjadi kesulitan

---

<sup>18</sup>Ibid., p.364

<sup>19</sup> Eddy Soegiarto dan Mardiyono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro dan Makro.*, (Tangerang Selatan: Mahkota Ilmu,2011), p.65

<sup>20</sup> Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner dan Dauglas D. Purvis, *Pengantar Makroekonomi* (Jakarta: Erlangga., 1999), p. 4

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya karena harga-harga barang naik tanpa diikuti naiknya upah.

Sadono Sukirno dalam bukunya mengatakan Inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Terlalu banyak uang yang memburu barang yang sedikit. Inflasi menunjuk pada harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga aset, dan sebagainya).

Tingkat harga yang tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan sebuah peristiwa yang terjadi secara terus menerus. Inflasi dianggap terjadi apabila terjadi kenaikan harga barang secara terus menerus dan saling mempengaruhi.

Sementara menurut Dornbuch, Fischer dan Starz, "Inflasi ialah persentase kenaikan harga umum."<sup>21</sup>

Menurut Fischer dan Starz, inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum dalam periode tertentu. Kenaikan harga barang sendiri bisa terjadi karena efek domino yang diakibatkan oleh naiknya sebuah komoditi tertentu lalu diikuti dengan komoditi lain.

Sementara Richard T. Troyen mengatakan, "*The inflation computed as the percentage rate of change in the price index over given periode.*"<sup>22</sup>

Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, inflasi merupakan akumulasi naiknya harga barang secara berkala dalam sebuah periode tertentu. Akibatnya

---

<sup>21</sup> R. Dornbuch, S. Fischer, R. Starz, *Macro Economic* (Jakarta, Erlangga : 2003), p. 588

<sup>22</sup> Richard T. Troyen, *Macroeconomics* (New Jersey: *Prentice hall international, inc .*, 2004), p. 6

masyarakat enggan melakukan kegiatan perekonomian sehingga menyebabkan produksi nasional menurun.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (*product or service*) dan atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (*Government*) seperti fiskal (perpajakan /pungutan/ insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi

meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* di mana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu : kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Dalam perbankan, bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau

pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).

Di samping itu, inflasi merupakan cara yang menarik sebagai alat pembelanjaan pembangunan, juga semacam pajak tak tampak (*invisible tax*) yang mengurangi konsumsi dengan menaikkan harga-harga barang dan jasa. Pemerintah dapat menciptakan inflasi dengan menambah jumlah uang yang beredar. Metode ini baik pada waktu permulaan, tetapi untuk jangka panjang akan membawa penderitaan terutama bagi mereka yang berpendapatan tetap. Lebih-lebih apabila inflasi tak terkendali lagi, maka akan membahayakan perkembangan ekonomi selanjutnya.<sup>23</sup>

Harus diakui pada tingkat tertentu, inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat. Sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan outputnya. Kendatipun belum dapat dibuktikan secara sistematis, umumnya para ekonom sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar

---

<sup>23</sup> Suparmoko dan Irawan, *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam*, (Yogyakarta:BPFE-UGM, 2008), p.324

5% per tahun. Jika tingkat inflasi sudah mencapai angka 10% atau bahkan lebih, maka akan mengganggu stabilitas ekonomi. apalagi bila yang terjadi adalah hiperinflasi (*hyperinflation*), yaitu inflasi yang melebihi angka 100% per tahun.

Ada beberapa masalah sosial (biaya sosial) yang muncul dari inflasi yang tinggi ( $\geq 10\%$  per tahun), yakni:

- Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat
- Memburuknya distribusi pendapatan
- Terganggunya stabilitas ekonomi.

Laju inflasi diukur dengan cara menghitung kenaikan persentase indeks harga dari periode pertama ke periode berikutnya. Formula untuk menghitungnya adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

$$\text{Inf } t = \frac{P_{it} - P_{it-1}}{P_{it-1}} \times 100\%$$

Inf t = Inflasi periode t (tahunan, kuartalan, atau bulanan)

$P_{it}$  = Indeks harga periode t

$P_{it-1}$  = Indeks harga periode sebelumnya

Pada tingkat inflasi tinggi terjadi penurunan output (kontraksi ekonomi). Hal tersebut sering disebut sebagai resesi. Pada tingkat inflasi rendah (di bawah 5%)

---

<sup>24</sup> Tri Kunawangsih dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), p.12

terjadi kenaikan output. Hal tersebut disebut sebagai ekonomi membaik (ekspansi).<sup>25</sup>

Segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka harga barang pada umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah. Maka dalam inflasi merayap upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Sebagai akibatnya kenaikan harga-harga yang berlaku terutama mengakibatkan pertambahan dalam keuntungan perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian inflasi diatas dapat didefinisikan bahwa Inflasi merupakan peristiwa yang terjadi di suatu negara untuk menggambarkan kenaikan harga barang secara terus menerus tanpa diikuti dengan kenaikan upah sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang enggan membeli banyak barang yang diinginkan sehingga menyebabkan kehiatan perekonomian di suatu negara menjadi lesu.

### **3. Investasi**

Investasi merupakan sebuah penanaman modal dengan mengharapkan keuntungan atau *dividen* di masa mendatang. Beberapa ahli menjelaskan tentang pengertian investasi.

Sunariyah mendefinisikan investasi adalah : “Investasi itu sendiri sebagai penanaman modal untuk satu atau beberapa aktiva yang dimiliki dan bisa dalam jangka waktu yang lama dengan harap akan mendapat keuntungan di masa yang akan datang, atau bisa dibidang ada tabungan masa depan.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. Op.cit., p.359

<sup>26</sup> Subandi. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Alfabeta. 2010. p.8

Sejalan dengan itu, Menurut Husnan juga berpendapat bahwa investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek kecil maupun proyek raksasa untuk memperoleh manfaat di masa mendatang.<sup>27</sup>

Investasi yang kebanyakan dilakukan oleh negara berkembang merupakan aplikasi dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik dari Harrod-Domar (*Harrod-Domar growth model*). Teori tersebut menjelaskan bahwa mekanisme perekonomian yang mengandalkan peningkatan investasi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi, langkah tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak cara pokok pembangunan untuk tinggal landas yakni dengan pengerahan atau mobilisasi dana tabungan (dalam mata uang domestik maupun valuta asing) guna menciptakan bekal investasi dalam jumlah yang memadai untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.<sup>28</sup>

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*). Bila diasumsikan, bahwa ada hubungan ekonomi langsung antara besarnya total stok modal (K) dengan GDP total (Y).

Dijelaskan melalui persamaan :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

---

<sup>27</sup> Setiawan, Adi. *Rahasia Terbesar Investasi*. Jakarta. Jakarta: Alfabeta. 2012. p.13

<sup>28</sup> Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. *Op.cit.*, p.127

Persamaan diatas merupakan versi sederhana dari persamaan terkenal dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, secara jelas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan ( $s$ ), serta rasio modal-output nasional ( $k$ ). Secara lebih spesifik, persamaan itu menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan dan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara “positif” berbanding lurus dengan rasio tabungan. Logika ekonomi yang terkandung dalam persamaan diatas sangatlah sederhana. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat.<sup>29</sup>

Teori Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh terhadap permintaan agregat, yaitu melalui penciptaan pendapatan dan terhadap penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi.<sup>30</sup>

Investasi yang bersumber dari luar negeri (PMA) dan dalam negeri (PMDN) merupakan salah satu indikator meningkatnya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut akan menjadi rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri.

---

<sup>29</sup> Ibid., p.129

<sup>30</sup> Subandi, Op.cit., p.57

Setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, umumnya sangat memperhatikan masalah distribusi pendapatan yang terjadi di negaranya. Beberapa ekonomi berpendapat bahwa perbedaan pendapat timbul karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan modal. Menurut susanti, pihak yang memiliki barang modal lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula dibandingkan dengan pihak yang memiliki sedikit barang modal.

Selain teori klasik, teori pertumbuhan Neo-klasik Rostow juga mengemukakan untuk menekankan perlunya perubahan yang bersifat multidimensional, karena dia tidak yakin akan kebenaran pandangan klasik yang menyatakan bahwa tingkat tabungan merupakan elemen kunci dalam pembangunan. Menurut pandangan klasik tersebut, tingkat tabungan yang tinggi akan memungkinkan adanya peningkatan pada kegiatan investasi sehingga mampu memacu tingkat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rostow, selain tingkat tabungan, untuk dapat memacu tingkat pertumbuhan ekonomi diperlukan juga perubahan-perubahan yang mendasar pada masyarakat karena perubahan-perubahan itulah yang akan memungkinkan terjadinya kenaikan pada tingkat tabungan dan investasi.<sup>31</sup> Perubahan-perubahan tersebut dalam artian adanya penemuan-penemuan baru dalam metode produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas input dan menurunkan biaya produksi. Adanya penemuan-penemuan baru tersebut tidak akan bermakna tanpa adanya dukungan dari kelompok pemilik modal dari pengusaha (entrepreneurs)

---

<sup>31</sup> Lincolin Arsyad. Op.cit., p.64

yang inovatif. Dengan kata lain, kenaikan tingkat kenaikan investasi bukan semata-mata disebabkan oleh kenaikan tingkat tabungan, tetapi juga karena adanya perubahan yang radikal pada persepsi masyarakat mengenai ilmu pengetahuan, modernisasi teknik produksi, pengambilan risiko, dan sebagainya.

Perbedaan pendapat karena perbedaan kepemilikan awal faktor produksi akan dapat dihilangkan atau dikurangi melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Dengan proses tersebut hasil pembangunan akan menetas (*trickle down effect*) dan menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Bila setelah proses tersebut masih ada perbedaan yang cukup timpang, maka dapat dilakukan pencedatan Keynesian yaitu melalui sistem perpajakan dan subsidi. Perpajakan dan subsidi dapat dipergunakan sebagai alat untuk redistribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, selain melalui usaha peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri, tetap dibutuhkan sumber pembiayaan luar negeri. Perlunya peningkatan investasi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Untuk mencapai target-target tersebut diperlukan usaha penciptaan iklim investasi yang menarik sehingga dapat menarik investor (penanam modal), menjamin kepastian usaha serta keamanan investasi.

Investasi yang merupakan pengakumulasian modal diharapkan mendapatkan keuntungan di masa depan. Alasan untuk melakukan suatu investasi berbeda-beda. Bagi perusahaan atau individu dalam membuat keputusan untuk menanamkan

modalnya dalam suatu investasi tentunya mengharapkan memperoleh profit di masa yang akan datang.

Sadono Sukirno mengatakan dalam bukunya bahwa kegiatan investasi dapat memicu suatu masyarakat untuk terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang tercipta atas investasi tersebut.<sup>32</sup> Dengan adanya investasi juga diharapkan membawa peningkatan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Dapat diasumsikan bahwa investasi di bidang sumber daya atau modal manusia seperti pada model pertumbuhan endogen, dapat menciptakan eksternalitas positif dan memacu produktivitas.

Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi, yang berdampak kepada meningkatnya pendapatan nasional dan taraf kemakmuran masyarakat dikarenakan terjadinya penambahan output. Dengan adanya investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan terjadi peningkatan output. Sumber daya domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang ditabung.<sup>33</sup>

Gambaran mengenai perkembangan investasi dari waktu ke waktu dapat diketahui dengan tiga macam cara, yaitu<sup>34</sup> :

---

<sup>32</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), p.121

<sup>33</sup> Rahardja Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi Ketiga*. (Jakarta: FE UI, 2008), p.151

<sup>34</sup> Dumairy, op. cit, p. 136

- 1) Menyoroti kontribusi pembentukan modal domestik bruto dalam konteks permintaan agregat
- 2) Mengamati data-data PMDN dan PMA
- 3) Menelaah perkembangan dana investasi yang disalurkan oleh dunia perbankan

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa investasi tidak hanya datang atau berasal dari dalam negeri saja (PMDN), tetapi juga datang dari luar negeri (PMA). Secara umum, PMA ada dua macam yakni PMA langsung (*Foreign Direct Investment*) dan PMA tidak langsung (*Indirect Investment/Portfolio Investment*).

Investasi langsung di Indonesia saat ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memperbaharui ketentuan perundang-undangan yang menyangkut investasi asing sebelumnya. UU tersebut mengatur baik investasi yang dilaksanakan oleh investor dalam negeri maupun investasi yang dilaksanakan oleh investor asing.<sup>25</sup>

Dalam konteks ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Penanaman modal adalah "segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia." Investasi secara langsung ini karena dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal. Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan

perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru.<sup>35</sup>

Dengan kata lain, PMA langsung merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan. Dengan kata lain, merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.

Berdasarkan pengertian-pengertian investasi di atas, dapat di definisikan bahwa investasi adalah sebuah kegiatan yang membuat para penanam modal atau perusahaan membeli faktor-faktor produksi dengan harapan penambahan output untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang.

---

<sup>35</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, .(Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2007), hal.122-123.

## **B. Hasil Penelitian Yang Relevan**

1. Yogi Sofiagy (2010). Tesis dengan judul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*". Metode analisis yang digunakan adalah teknik kuantitatif Indeks Williamson, Tipologi Klaases dan Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi disparitas pendapatan yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu 2003-2008 mencapai angka 0,6 dan cenderung menurun. Salah satu hasil regresi dan data panel menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja dan alokasi investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Sultan dan Jamzani Sodik (2010), jurnal dengan judul Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jawa Tengah serta faktor-faktor yang Mempengaruhi periode 2000-2004 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ini dapat diperoleh bahwa: terdapat ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Pertumbuhan penanaman modal asing mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional. Pertumbuhan ekspor mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
3. Anneli Kaasa (2003), paper dengan judul "*Paper Factors Influencing Income Inequality in Transition Economics*." Paper ini menyajikan analisis pengaruh faktor yang berbeda pada ketimpangan pendapatan dalam negara transisi. Ada

14 indikator atau faktor awal yang kemudian dipilih menjadi lima komponen, yaitu tingkat demografi, pengembangan proses, tingkat keseluruhan pembangunan suatu negara, sejauh mana proses transisi, dan penciptaan modal manusia. Model regresi yang didapat termasuk semua komponen sebagai variabel independen menjelaskan 65,2% dari varians dalam koefisien gini.

4. Sumei Tang dan Saroja Selvanathan (2005). Jurnal dengan judul "*Foreign Direct Investment and Regional Income Inequality in China*". Jurnal ini menganalisis dampak FDI pada ketimpangan pendapatan regional di China dengan memperkirakan tiga persamaan terpisah untuk nasional, perkotaan dan pedesaan dan menggunakan data panel periode 1978-2002. Hasil menunjukkan bahwa arus masuk FDI adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan regional di tingkat nasional, pedesaan, dan perkotaan. Faktor-faktor lain yang menyebabkan ketimpangan regional untuk meningkatkan termasuk tingkat pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan reformasi ekonomi di BUMN dan industri.
5. R. Abdul Maqin (2005), Jurnal dengan judul "*Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat*" ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri, dan tingkat pendidikan pekerja terhadap disparitas pendapatan di Jawa Barat. Menggunakan data panel dari tahun 2000-2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 25 kabupaten dan kota terdapat 8 daerah yang terdiri dari 7 kabupaten dan 1 kota yang memiliki indeks disparitas pendapatan yang lebih besar dari nilai rata-rata kota. Sementara

itu hasil estimasi pertumbuhan ekonomi dan PMDN mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan.

6. Niken Sulistiowati, dkk (2010). Jurnal dengan judul “*Dampak Peningkatan Pengeluaran Pendidikan terhadap Output Sektoral dan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*” mengemukakan hasil penelitian bahwa distribusi pendapatan dipengaruhi secara signifikan oleh inflasi. Inflasi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan, karena inflasi mengurangi daya beli masyarakat. Semakin tinggi tingkat inflasi, menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan dan meingkatkan kemiskinan.
7. Penelitian yang dilakukan Hongyi Li dan Heng-Fu Zou pada tahun 2002 dalam jurnal yang berjudul “*Inflation, Growth, and Income Distribution : A Cross Country Study*”, mengemukakan bahwa adanya hubungan positif antara inflasi, pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan. Kedua peneliti tersebut menemukan bahwa adanya determinan antara kedua variabel (inflasi dan ketimpangan pendapatan). Dengan menggunakan data panel di lintas negara, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa inflasi memperburuk distribusi pendapatan, inflasi meningkatkan pangsa pendapatan orang kaya, inflasi memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan kepada pendapatan orang miskin dan kelas menengah, serta mengurangi laju pertumbuhan ekonomi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Hongyi Li and Heng-Fu Zou, 2002, Inflation, Growth, and Income Distribution : A Cross Country Study, *Annals Economics and Finance*, JEL Classification Number D3, E3, O4

## **C. Kerangka Teoritik**

### **1. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Teori yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurutnya, ketidakmerataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan ini berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar, hal ini menurut Myrdal dikarenakan oleh peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar ketimpangan mempersempit ketimpangan regional. Jika segala sesuatunya diserahkan pada kekuatan pasar, tanpa diiringi oleh intervensi kebijakan apapun, maka produksi, industri, perdagangan, perbankan, dan hampir semua kegiatan ekonomi yang di dalam suatu perekonomian sedang berkembang yang cenderung mendatangkan keuntungan akan mengelompokkan daerah padat modal tersebut meninggalkan daerah lain yang masih kurang modal menjadi wilayah yang terbelakang.

Teori lain yang mendukung adalah teori investasi dari Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh terhadap permintaan agregat, yaitu melalui penciptaan pendapatan dan terhadap penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi.

Selanjutnya penelitian Hansen and Tarp (2000) mengeluarkan hasil hipotesis menyimpulkan sebagai berikut :

*“we find a "consistent pattern" results. help increase aggregate savings, help increase investment, and there is a positive relationship between aid and growth.”<sup>37</sup>*

Menurut Hansen dan Tarp, mereka menemukan sebuah pola terkait investasi di negara penerima dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan mempunyai hubungan yang positif. Investasi dari luar merupakan bantuan yang akan meningkatkan tabungan dalam negeri.

Penelitian yang dilakukan Juarez Rivera, Carmen Guadalupe, dan Angeles Castro di Mexico di tahun 1994-2006 yang berjudul *“Foreign direct investment in Mexico. Determinants and its effect on income inequality”* mereka menyebutkan bahwa penelitian yang menggunakan data panel di 32 daerah di Mexico adanya determinan antara investasi asing dengan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, investasi asing menyebabkan meningkatnya ketimpangan di Mexico.<sup>38</sup>

Sumei Tang dan Saroja Selvanathan (2005). Jurnal dengan judul *“Foreign Direct Investment and Regional Income Inequality in China*. Jurnal ini menganalisis dampak FDI pada ketimpangan pendapatan regional di China dengan memperkirakan tiga persamaan terpisah untuk nasional, perkotaan dan pedesaan dan menggunakan data panel periode 1978-2002. Hasil menunjukkan bahwa arus masuk FDI adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan regional di tingkat nasional, pedesaan, dan perkotaan. Faktor-faktor lain yang menyebabkan ketimpangan regional untuk

---

<sup>37</sup> Tulus Tambunan, Op. Cit , p.3

<sup>38</sup> Juarez Rivera, Carmen Guadalupe, Angeles Castro, Foreign Direct Investment. Determinants and its effect on income inequality. Akuntansi dan Administrasi, Vol. 58, No. 4

meningkatkan termasuk tingkat pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan reformasi ekonomi di BUMN dan industri.<sup>39</sup>

## **2. Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Menurut Romer dan Romer, mereka mengatakan, respon dinamis ukuran konsumsi serta ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Menurut mereka, jika tidak bisa menjaga dengan baik kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bisa mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Sementara teori dari Fischer and Modigliani yang mengatakan jika inflasi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan orang miskin, melebihi dari orang kaya karena merugikan rakyat miskin. Inflasi Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini ditandai dengan permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, sehingga menimbulkan “inflationary gap”. Selama “inflationary gap” tetap ada, selama itu pula proses inflasi akan berkelanjutan. Menurut Keynes, perubahan dalam jumlah uang yang beredar tidak akan menimbulkan peningkatan pendapatan nasional. Hasil penelitian mengemukakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya, inflasi tidak berpengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi. Namun, semakin tinggi inflasi tidak diikuti dengan bertambahnya pendapatan masyarakat yang mayoritas masih berpendapatan rendah.

---

<sup>39</sup> Sumei Tang dan Saroja Selvanathan, *Foreign Direct Investment and Regional Income Inequality in China*, (Australia: University Nathan, 2005), p. 5-6

Penelitian yang dilakukan Maria Rueda Maurer dan Pinar Ayse Yesin pada tahun 2004 dalam jurnal yang berjudul "*Income Inequality and Inflation*", mengemukakan bahwa adanya hubungan positif antara inflasi dan ketimpangan pada data di 48 negara pada tahun 1980-2000. Kedua peneliti tersebut menemukan bahwa adanya determinan antara kedua variabel (ketimpangan pendapatan dan inflasi) bahwa beberapa bagian dari inflasi yang diamati dapat dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi.<sup>40</sup>

Penelitian yang dilakukan Eliana Cardoso, Riccardo Barros, dan Andre Urani pada tahun 1993 di Brazil dalam jurnal yang berjudul "*Inflation and Unemployment as Determinants of Inequality in Brazil : The 1980*", mengemukakan bahwa adanya hubungan positif antara inflasi, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Ketiga peneliti tersebut menemukan bahwa adanya determinan antara ketiga variabel (inflasi, pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan). Dengan menggunakan data bulanan di enam daerah metropolitan di Brazil menyatakan bahwa inflasi mengurangi pendapatan tetap masyarakat kelas menengah.<sup>41</sup>

Penelitian yang dilakukan Stefania Albanesi pada tahun 2007 dalam jurnal yang berjudul "*Inflation and inequality*", mengemukakan bahwa adanya hubungan positif antara inflasi dan ketimpangan pada datalintas negara. Albanesi mengemukakan bahwa korelasi positif tersebut merupakan buah dari

---

<sup>40</sup> Maria Rueda Maurer and Pinar Ayse Yesin, 2004, *Income Inequality and Inflation*, JEL Classification Number E25, E31, E63

<sup>41</sup> Eliana Cardoso, Riccardo Barros, Andre Urani, 1980, *Inflation and Unemployment as Determinants of Inequality in Brazil : The 1980*, Text For Discussion April 1993

konflik yang terjadi antara bagian yang berseberangan pada distribusi pendapatan yang disebabkan oleh kerapuhan golongan berpendapatan rendah terhadap inflasi.<sup>42</sup>

### **3. Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (1973) dalam Lincoln Arsyad mengemukakan delapan hal yang membuat terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang<sup>43</sup> :

- 1) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
- 2) Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
- 3) Ketidakmerataan antar daerah.
- 4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
- 5) Rendahnya mobilitas sosial.
- 6) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
- 7) Memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor di negara sedang berkemang.
- 8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Delapan faktor diatas merupakan yang mempengaruhi faktor ketimpangan distribusi pendapatan di sebuah negara. Terlihat investasi yang berpusat di

---

<sup>42</sup> Albanesi, S., 2007, Inflation and Inequality, Journal of Monetary Economics Vol. 54 2007

<sup>43</sup> Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, p.147

sebuah daerah saja bisa mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan karena minimnya kesempatan kerja bagi di daerah yang minim alokasi investasi. Sementara inflasi juga mempengaruhi karena dengan naiknya harga barang namun tidak diikuti dengan naiknya pendapatan.

#### **D. Perumusan Hipotesis**

1. Diduga terdapat pengaruh negatif investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
2. Diduga terdapat pengaruh positif inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
3. Diduga terdapat pengaruh investasi dan inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (sahih, benar, valid) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliable) tentang:

1. Pengaruh investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
2. Pengaruh inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
3. Pengaruh investasi dan inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

#### **B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data distribusi pendapatan dengan menggunakan data koefisien gini dalam skala nasional yaitu Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) karena BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) mempublikasikan banyak data statistik di Indonesia. Data inflasi yang juga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) karena BI ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) mempublikasikan data inflasi Indonesia untuk publik. Sedangkan data investasi yang di peroleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM/[www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)). Waktu penelitian ini dimulai dari tahun 2007-2012 karena dalam periode tahun tersebut keadaan perekonomian Indonesia fluktuatif akibat terjadinya krisis global, tingkat inflasi yang naik turun, kebijakan kenaikan harga BBM, serta dilaksanakannya pemilu pada

tahun 2009 di Indonesia. Rentang waktu tahun 2007 – 2012 akan memberikan data pengaruh investasi, inflasi dari fenomena-fenomena perekonomian tersebut yang terjadi di Indonesia.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Ex Post Facto*. *Ex Post Facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut<sup>1</sup>. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara investasi dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara inflasi dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode OLS (*Ordinary Last Square*). Regresi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kuantitatif antara variabel-variabel yang diteliti yaitu ketimpangan distribsui pendapatan sebagai variabel terikat, investasi sebagai variabel bebas pertama dan inflasi sebagai variabel bebas kedua.

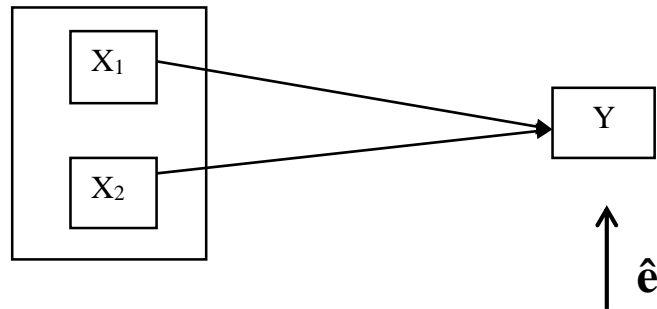
Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu untuk menerapkan kaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini untuk menguji ketimpangan distribusi pendapatan (dilihat dari koefisien gini) yang dipengaruhi oleh investasi dan inflasi.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: ALFABETA cv, 2010), p.7

Konstelasi penelitian:

Konstelasi hubungan antar variabel



Keterangan:

$X_1$  = Investasi (variabel bebas)

$X_2$  = Inflasi (variabel bebas)

$Y$  = Ketimpangan Distribusi Pendapatan (variabel terikat)

→ = arah pengaruh

$\hat{e}$  = error

#### D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data dalam bentuk yang sudah jadi atau berupa data publikasi. Data tersebut mengenai jumlah ketimpangan distribusi pendapatan (berdasarkan koefisien gini), investasi, dan inflasi. Data yang digunakan adalah data pada 33 provinsi di Indonesia yang diambil per tahun, maka objek berjumlah 198, diperoleh dari Januari 2007 sampai Desember 2012. Data sekunder merupakan data dalam bentuk yang sudah jadi atau berupa data publikasi. Data tersebut sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bank Indonesia (BI).

## **E. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pengukuran variabel–variabel penelitian. Operasionalisasi variabel untuk menentukan jenis indikator, serta skala dan variabel – variabel yang terkait.

### **1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

#### **a. Definisi Konseptual**

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah perbedaan tingkat perekonomian antar daerah dalam suatu negara karena pemusatan kegiatan perekonomian di pusat kota yang menyebabkan terjadinya perbedaan standar hidup seluruh masyarakat.

#### **b. Definisi Operasional**

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilihat dari koefisien gini (*gini ratio*) suatu negara dalam suatu periode. Data koefisien gini tersebut diperoleh dari web publikasi badan pusat statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) data yang digunakan pada tahun 2007 – 2012.

### **2. Investasi**

#### **a. Definisi Konseptual**

Investasi adalah sebuah kegiatan yang membuat para penanam modal atau perusahaan membeli faktor-faktor produksi dengan harapan pertambahan output untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang.

#### **b. Definisi Operasional**

Investasi dalam penelitian ini diperoleh dari laporan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai Realisasi Penanaman Modal baik berasal dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA). PMA yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan FDI yang bisa didapatkan dari

web publikasi badan pusat statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) atau web publikasi badan koordinasi penanaman modal ([www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)) data digunakan pada tahun 2007 – 2012.

### **3. Inflasi**

#### **a. Definisi Konseptual**

Inflasi merupakan peristiwa yang terjadi di suatu negara untuk menggambarkan kenaikan harga barang secara terus menerus tanpa diikuti dengan kenaikan upah sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang enggan membeli banyak barang yang diinginkan sehingga menyebabkan kehiatan perekonomian di suatu negara menjadi lesu.

#### **b. Definisi Operasional**

Inflasi adalah tingkatan persentase kenaikan harga – harga di masyarakat. Data inflasi diperoleh dari bank Indonesia yang dirilis setiap bulan melalui web publikasi badan pusat statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) atau web publikasi bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) data digunakan pada tahun 2007 – 2012.

### **E. Teknik Analisis Data**

#### **1. Model Regresi Data Panel**

Regresi adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui<sup>2</sup>. Untuk mengetahui hubungan secara kuantitatif dari dua variabel atau lebih yakni inflasi dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

---

<sup>2</sup>Agus Widarjono, *Ekonometrika* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), hlm.7

dapat dilihat berdasarkan teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Fungsi regresinya adalah sebagai berikut :

$$INE = \beta_0 + \beta_1 INF + \beta_2 LnINV + \varepsilon$$

Keterangan:

INE	= Ketimpangan Distribusi Pendapatan
INF	= Inflasi
INV	= Investasi
$\beta_0$	= <i>intercept</i>
$\beta_1 \beta_2$	= Koefisien Regresi Parsial untuk INF dan INV
$\varepsilon$	= <i>Error/disturbance</i> (variabel pengganggu)
Ln	= Logaritma Natural

Penelitian ini menggunakan data panel, sehingga regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel<sup>3</sup>. Secara umum dengan menggunakan data panel akan menghasilkan intersep dan *slope* koefisien yang berbeda pada setiap objek dan setiap periode waktu.

Analisis regresi dengan data panel dapat dilakukan dalam beberapa langkah<sup>4</sup>, yaitu :

- a. Estimasi data panel dengan hanya mengombinasikan data *time series* dan *cross-section* dengan menggunakan metode OLS sehingga dikenal dengan estimasi *common effect*. Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu dan waktu.
- b. Estimasi data panel dengan menggunakan *fixed effect*, di mana metode ini mengasumsikan bahwa individu atau objek memiliki intersep yang berbeda, tetapi memiliki *slope* regresi yang sama. Suatu objek memiliki

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.353

<sup>4</sup>Sofyan Yamin, dkk, *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda : Aplikasi dengan software SPSS, Eviews, MINITAB dan STATGRAPHICS* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.200

intersep yang sama besar untuk setiap perbedaan waktu demikian juga dengan koefisien regresinya yang tetap dari waktu ke waktu (*time invariant*). Untuk membedakan antara individu dan individu lainnya digunakan variabel *dummy* (variabel contoh/semu) sehingga metode ini sering juga disebut *least square dummy variables* (LSDV).

- c. Estimasi data panel dengan menggunakan metode *random effect*. Metode ini tidak menggunakan variabel *dummy*, tetapi menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarindividu. Model *random effect* mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep, tetapi intersep tersebut bersifat *random* atau stokastik. Metode *generalized square* (GLS) digunakan untuk mengestimasi model regresi ini sebagai pengganti metode OLS.

## 2. Uji Kriteria Pemilihan Model Terbaik

Data panel memiliki tiga model pendekatan yaitu *Pooled Least Square* (PLS) atau *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Untuk memilih model yang tepat dalam analisis data panel, maka terdapat beberapa pengujian yang dapat digunakan yaitu *Chow Test* dan *Hausman Test*<sup>5</sup>.

Pemilihan model estimasi terbaik dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan model terbaik yang sesuai dengan objek penelitian. Oleh karena itu diperlukan beberapa langkah dalam menempuh pemilihan model terbaik tersebut yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

---

<sup>5</sup> Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2007), hlm.21.

**Tabel III.1**  
**Pengujian Signifikansi Model Panel**

No	Pengujian Signifikansi Model	Rumus Uji	Keterangan	Keputusan
a.	CE atau FE	Uji Chow	Tolak $H_0$ $F_{hitung} > F_{tabel}$	FE lebih baik dari CE
b.	FE atau RE	Uji Hausman	Tolak $H_0$ $Chi^2_{hitung} > Chi^2_{tabel}$	FE lebih baik dari RE

Sumber : Wing Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika*, 2011

Keterangan:

CE = *Common Effect*

FE = *Fixed Effect*

RE = *Random Effect*

**a) Chow Test**

*Chow Test* adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Model *Common Effect*

$H_1$  : Model *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan *Chow* statistik (F statistik) hitung yang akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (df) sebanyak n-1 untuk *numerator*. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka  $H_0$  ditolak

sehingga teknik regresi data panel dengan *Fixed Effect* lebih baik dari *Common Effect*.

**b) Hausman Test**

*Hausman Test* adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam memilih model terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Model *Random Effect*

$H_1$  : Model *Fixed Effect*

Dasar untuk penolakan  $H_0$  yaitu dengan menggunakan statistik *Hausman* dan membandingkannya dengan *Chi Square*. Nilai *Hausman test* hasil pengujian lebih besar dari tabel (nilai kritis statistik dari *chi-square*), maka  $H_0$  ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect* dan sebaliknya.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum memulai pengujian hipotesis, harus terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap data yang digunakan. Uji ini dilakukan agar persamaan regresi berganda bebas dari gejala multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi, sehingga regresi valid dan bersifat *Best Unbiased Linier Estimator* (BLUE). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian. Uji normalitas dilakukan pada data sampel penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis. Pengujiannya menggunakan alat statistik uji *Jarque-Bera* dengan kriteria data berdistribusi normal jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan data tidak berdistribusi normal jika signifikansinya kurang dari 0,05.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain<sup>6</sup>.

Hipotesis

- $H_0$  : Varians error bersifat homoskedastisitas
- $H_1$  : Varians error bersifat heteroskedastisitas

Statistik pengujian: Uji White

Alfa pengujian : 5%

Jika hasil  $p$ -value Prob. Chi Square  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya varians error bersifat homoskedastisitas.

---

<sup>6</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Multivarite dengan Program IBM SPSS 19* (Semarang,: BP UNDIP, 2011) ,hlm. 105

### c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi hubungan linier antar antarvariabel independen<sup>7</sup>. Salah satu cara menghitung multikolinieritas adalah dengan variance inflation factor (VIF). Dapat menggunakan rumus:<sup>8</sup>

$$VIF = \frac{1}{(1 - R_i^2)}$$

Dimana:

$R^2$  : Koefisien determinasi pada *auxiliary regression*

Menganalisis derajat multikolinieritas dengan cara mengevaluasi nilai VIF. Semakin tinggi nilai VIF suatu variabel tertentu, semakin tinggi varian koefisien estimasi pada variabel tersebut. Dengan demikian semakin berat dampak dari multikolinieritas. Pada umumnya, multikolinieritas dikatakan berat apabila angka VIF dari suatu variabel melebihi 10.

## 1. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji seluruh hipotesis yang ada dalam penelitian ini dengan tingkat kepercayaan 95% atau  $\alpha = 5\%$ .

### a. Uji Keberartian Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)

Uji *t* digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebasnya.

---

<sup>7</sup> Winarno, *Op. Cit.*, hlm. 51

<sup>8</sup> Sarwoko, *Dasar-dasar Ekonometrika*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 120

Hipotesis pengujian:

$$H_0: \beta_i = 0$$

$$H_1: \beta_i \neq 0$$

Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji *t-student*. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

$\beta_i$  adalah nilai penduga parameter ke-*i*,  $se(\beta_i)$  adalah simpangan baku dari nilai penduga parameter ke-*i*.

Hipotesis nol ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Keputusan ini dapat juga didasarkan pada perbandingan nilai *p-value* dengan tingkat signifikansinya ( $\alpha$ ). Hipotesis nol ditolak jika nilai *p-value* lebih kecil dari ( $\alpha$ ). Hal ini berarti secara parsial variabel bebas ke-*i* signifikan memengaruhi variabel tidak bebasnya dengan tingkat kepercayaan sebesar  $(1-\alpha) \times 100$  persen.

#### **b. Uji Keberartian Regresi (Uji F)**

Untuk menguji keberartian regresi dalam penelitian ini digunakan Uji statistik F dengan tabel ANAVA. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua koefisien variabel independen atau bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen/terikat<sup>9</sup>. Untuk menghitung uji keberartian regresi dapat mencari  $F_{hitung}$  dengan rumus di bawah ini<sup>10</sup>:

---

<sup>9</sup>Imam Ghozali, *Op. Cit.*, hlm.98

<sup>10</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm.286

$$F = \frac{R^2 (k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan:

$R^2$  = Koefisien determinasi

$n$  = Jumlah data

$k$  = Jumlah variabel bebas

Hasilnya dibandingkan dengan tabel F, dengan taraf signifikan ( $\alpha$ ) adalah 0,05. Hipotesis adalah sebagai berikut :

$H_0: \beta_i = 0$

$H_1: \beta_i \neq 0$

Kriteria pengujian :

- Terima  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  yang berarti seluruh variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.
- Tolak  $H_0$  jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yang berarti seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

### c. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali, Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen<sup>11</sup>. Atau dengan kata lain, koefisien determinasi mengukur seberapa baik model yang dibuat mendekati fenomena variabel dependen yang sebenarnya.  $R^2$  (*R Square*) juga mengukur berapa besar

---

<sup>11</sup> Imam Ghozali, *op. cit.*, hlm. 97

variasi variabel dependen mampu dijelaskan variabel-variabel independen penelitian ini. Rumus menghitungnya adalah dengan terlebih dahulu mencari nilai R atau koefisien korelasi:

$$R_{12}^2 = \frac{\beta_1 \Sigma X_1 Y + \beta_2 \Sigma X_2 Y}{\Sigma Y^2}$$

Maka nilai  $R^2 = R_{12}^2$

Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai  $R^2$  mendekati angka satu, berarti variabel independen dalam model semakin mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai  $R^2$  yang mendekati angka nol, berarti variabel independen yang digunakan dalam model semakin tidak menjelaskan variasi variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Deskripsi data yang dipaparkan dalam tiga bagian sesuai dengan variabel dalam penelitian ini yaitu investasi dan inflasi sebagai variabel independen (bebas) dan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai variabel dependen (terikat).

##### **1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Penelitian ini menggunakan data koefisien gini yang di peroleh dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2007 sampai 2012. Data ini berupa data tahunan masing-masing provinsi yang dipublikasikan oleh BPS serta BKPM.

Berdasarkan data yang disajikan menunjukkan bahwa jumlah ketimpangan setiap tahunnya cenderung bertambah. Pada tahun 2007, ketimpangan tertinggi pada tahun tersebut menurut indeks gini mencapai angka 0,412 di provinsi Papua. Ini mengartikan bahwa ketimpangan di Papua tidak merata. Sebagian ada yang berpenghasilan tinggi sebagian pula ada yang berpenghasilan rendah. Masih banyak pendapatan tinggi yang dikuasai oleh sekelompok orang atau individu. Hasil PDRB sebesar 4,34% (lampiran) namun sebagian besar masyarakat yang berpendapatan rendah hanya menikmati sedikit dari hasil pertumbuhan sedangkan masyarakat yang berpenghasilan tinggi menikmati sebagian besar hasil pertumbuhan dan mengakibatkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan di Papua. Hal itu berbanding terbalik dengan provinsi Aceh. Ketimpangan terendah ada di provinsi DI Aceh yang berada pada angka 0,268 serta laju PDRB provinsi pada saat ini sebesar 2,36%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat

di provinsi Aceh cukup merata karena hasil pertumbuhan bisa dinikmati oleh hampir seluruh masyarakatnya sehingga ketimpangannya rendah. karena pengeluaran yang dilakukan sebagian besar masyarakat Aceh Pada tahun tersebut, rata-rata ketimpangan di tiap provinsi di Indonesia mencapai angka 0,36 sementara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu sebesar 5,67%. Angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terlihat belum berkualitas karena belum meratanya distribusi pendapatan di Indonesia dan masih banyak pula masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Selanjutnya pada tahun 2008, ketimpangan tertinggi masih berada di provinsi Papua dengan angka 0,40 sementara laju PDRB di provinsi Papua sebesar 1,40%. Laju PDRB masih banyak dinikmati oleh masyarakat dikalangan pendapatan yang tinggi sehingga hasil pertumbuhan belum bisa sepenuhnya dinikmati masyarakat berpendapatan kelas bawah. Angka keduanya menurun dikarenakan adanya krisis global dunia. Meskipun Indonesia tidak terkena dampak yang cukup signifikan, namun tetap saja laju perekonomian melambat. dan untuk terendah pada tahun tersebut berada pada provinsi Kep. Bangka Belitung dengan angka 0,26 dengan laju PDRB sebesar 4,54%. Artinya pada tahun tersebut, provinsi Kep. Bangka Belitung sudah bisa menikmati hasil pertumbuhan untuk seluruh golongan masyarakatnya. Ketimpangan rata-rata pada tahun 2008 ini turun dari tahun sebelumnya menjadi angka 0,35 sementara laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74% naik dari tahun sebelumnya yang mengartikan bahwa pada tahun tersebut, meski terjadi krisis global, Indonesia bisa mengurangi ketimpangan pendapatannya.

Bergeser ke tahun berikutnya pada 2009, dimana pada tahun tersebut ada pemlihan umum, ketimpangan rata-rata di setiap provinsi umumnya bertambah. Ketimpangan tertinggi pada tahun tersebut tidak lagi di provinsi Papua, melainkan provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai angka 0,39. Sementara laju PDRB di Sulawesi Selatan sebesar 6,23%. Dengan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, namun provinsi Sulawesi Selatan belum bisa meratakan pendapatan masyarakatnya. Sementara ketimpangan tersendah pada tahun tersebut ada pada provinsi Jambi yang menyentuh angka 0,27 dengan laju PDRB sebesar 6,39%. Artinya, pada provinsi Jambi ketimpangan pendapatan sudah bisa ditekan dengan masyarakat provinsi Jambi bisa menikmati hasil pertumbuhan pada semua golongan masyarakatnya. Sementara rata-rata ketimpangan pada tiap provinsi di Indonesia mencapai angka 0,37 dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun tersebut sebesar 4,77%. Angka pertumbuhan ekonomi ini turun dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pemilu dan imbas krisis global dunia yang mengakibatkan investasi berkurang menjadikan ketimpangan pendapatan di Indonesia naik dari tahun sebelumnya karena hasil pertumbuhan belum bisa ditekan diseluruh Indonesia.

Pada tahun 2010, ketimpangan yang terjadi di Indonesia naik dari tahun sebelumnya. Rata-rata ketimpangan di Indonesia mencapai angka 0,38 sementara angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6,14%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Namun lagi-lagi, meningkatnya angka pertumbuhan ini namun belum bisa mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia karena masih banyak golongan masyarakat kelas atas atau kelompok yang menguasai serta menikmati hasil pertumbuhan tersebut. Angka ketimpangan tertinggi pada tahun tersebut ada di

provinsi Banten dan Sulawesi Tenggara dengan angka 0,42 dengan laju PDRB sebesar 6,11% dan 8,22%. Kedua provinsi ini bisa mendapatkan hasil pertumbuhan yang tinggi, namun ketimpangan pendapatan di kedua provinsi tersebut juga meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan masih banyaknya golongan masyarakat berpendapatan kelas atas atau kelompok yang menikmati hasil pertumbuhan. Sementara angka ketimpangan tersendah berada pada Kep. Riau dengan angka 0,29 dengan laju pertumbuhan PDRB 7,19%. Provinsi Kep. Riau ini bisa menekan angka ketimpangan pendapatan dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi disebabkan oleh meratanya pemerataan pendapatan pada semua golongan masyarakat di provinsi tersebut.

Berikutnya pada tahun 2011, ketimpangan rata-rata di Indonesia kembali naik dengan angka 0,41 dengan laju pertumbuhan 6,35%. Angka ini kembali naik dari tahun sebelumnya yang menjelaskan bahwa di Indonesia meskipun pertumbuhan ekonomi bisa meningkat namun belum cukup untuk bisa menekan laju ketimpangan pendapatan yang meningkat di setiap tahunnya karena masih banyak golongan masyarakat berpendapatan kelas atas yang menguasai dan menikmati hasil pertumbuhan tersebut. Angka ketimpangan tertinggi berada pada provinsi DKI Jakarta dengan angka 0,44 dengan laju PDRB sebesar 6,73%. Angka yang cukup tinggi namun ketimpangan masih terjadi di provinsi tersebut karena banyaknya golongan masyarakat kelas bawah yang tidak menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tersebut. Sementara ketimpangan terendah pada tahun tersebut berada pada provinsi Kep. Bangka Belitung dengan angka 0,30 dengan laju PDRB sebesar 6,50%. Provinsi Kep. Bangka Belitung sudah bisa mengurangi atau menekan

ketimpangan pendapatan dengan bisa pemeratakan hasil pertumbuhan yang tinggi tersebut kepada semua golongan masyarakatnya.

Dan pada tahun terakhir penelitian yaitu 2012, angka ketimpangan rata-rata di Indonesia naik menjadi 0,413 sementara laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,28%. Angka yang cukup tinggi dari pertumbuhan ekonomi di sebuah negara namun tidak berkualitas karena ketimpangan pendapatan pada negara tersebut juga ikut naik. Hasil pertumbuhan tersebut belum bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat sehingga ketimpangan pendapatan menjadi naik. Provinsi yang mencapai angka ketimpangan tertinggi adalah Gorontalo dan Papua dengan angka 0,44 dengan laju PDRB pada kedua provinsi tersebut sebesar 7,71% dan 1,08%. Sementara terendah ada pada provinsi Kep. Bangka Belitung dengan angka 0,29 dengan laju PDRB sebesar 5,73%. Provinsi Kep. Bangka Belitung sudah bisa mengurangi dan menekan ketimpangan pendapatan dengan berhasil pemeratakan pendapatan di setiap golongan masyarakat dari hasil pertumbuhan tersebut. Pada tabel indeks gini (lampiran) menjelaskan rasio gini di Indonesia periode 2007-2012.

Tabel menunjukkan bahwa jumlah ketimpangan distribusi pendapatan di setiap provinsi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan secara perlahan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Walaupun demikian, ketimpangan distribusi pendapatan tetap di kategorikan buruk karena cenderung terus mengalami peningkatan.

## **2. Inflasi**

Inflasi merupakan naiknya harga barang secara umum atau jumlah uang beredar yang berada di masyarakat. Inflasi di Indonesia menunjukkan angka yang

fluktuatif hampir setiap tahunnya. Dari data BPS, mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2007 inflasi di Indonesia terus menunjukkan naik turun. Sejalan dengan naik turunnya inflasi dalam jangka menengah 2007-2012, Bank Indonesia akan mulai menurunkan tingkat BI Rate secara gradual. Sinergi antara komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro selain memberi dampak positif terhadap sisi penawaran, juga memberi dampak positif terhadap sisi permintaan.

Fenomena fluktuatif tersebut disebabkan oleh beberapa hal, beberapa diantaranya adanya krisis global yang terjadi pada tahun 2008, serta dampak dari diselenggarakannya pemilu pada tahun 2009. Hal-hal yang terjadi tersebut menuntut pemerintah untuk membuat suatu sinergi dari kebijakan baik secara fiskal maupun moneter, guna menstabilkan perekonomian. Inflasi secara nasional yang fluktuatif juga terjadi di semua provinsi. Tercatat dari tahun 2007-2012 hampir setiap provinsi di Indonesia mengalami inflasi secara naik turun. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari BPS per provinsi dari tahun 2007-2012. Angka inflasi dalam persentase pada tahun 2007 mencapai 7,22, kemudian pada tahun 2008 12,21. Tahun 2009 inflasi di Indonesia kembali turun menjadi 3,33. Kemudian pada 2010 kembali meningkat menjadi 7,19. Tahun 2011 kembali turun menjadi 4,08 dan tahun 2012 naik menjadi 4,48. Angka inflasi di Indonesia ditunjukkan dalam tabel inflasi (lampiran).

Dalam tabel tersebut menunjukkan inflasi pada tahun 2008 rata-rata mencapai angka dua digit dan yang terbesar di Provinsi Papua yang mencapai angka 20,03%. Pada tahun tersebut inflasi memang berkejolak cukup besar dikarenakan

adanya krisis ekonomi global di luar negeri walaupun Indonesia tidak mengalami imbas yang besar.

Sementara inflasi pada tahun 2012 di Kepulauan Bangka menjadi yang tertinggi pada tahun tersebut yang mencapai angka 6,7%. Pada tahun tersebut pula inflasi di Indonesia secara keseluruhan sudah mencapai angka 10% dibanding lima tahun sebelumnya.

### **3. Investasi**

Investasi merupakan kegiatan dimana pemilik modal menaruh sebagian modalnya ke negara atau wilayah tertentu dengan mengharapkan keuntungan di waktu mendatang. Dalam penelitian ini investasi yang digunakan adalah PMA dengan PMDN.

Investasi yang dilakukan oleh investor asing yang terjadi di dalam negeri juga terus meningkat setiap tahunnya. Data dalam tabel realisasi PMA yang mana dalam penelitian ini merupakan PMA jenis FDI (lampiran) juga menunjukkan realisasi jumlah PMA dari tahun 2007-2012. Tahun 2008 mencapai angka US\$ 10341,4 dan terus naik hingga tahun 2012 mencapai angka US\$ 24564,7.

Investor asing tampaknya masih sulit untuk melakukan investasi di luar pulau Jawa. Tercatat, di enam provinsi pulau Jawa investasi yang dilakukan investor masing masih sangat besar terutama di provinsi DKI Jakarta yang mencapai angka di atas 3000 juta US\$ dibandingkan dengan pulau lain. Alasan utama tentu karena DKI Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia, di Jakarta pula menjadi pusat pemerintahan dan juga ada pusat perekonomian.

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan investor asing secara keseluruhan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 total realisasi total PMA di 33 provinsi di Indonesia senilai 10341,4 juta US\$. Pada tahun tersebut realisasi PMA terkecil ada di provinsi Maluku dengan nilai 0,20 juta US\$. Sementara untuk realisasi PMA terbesar pada tahun tersebut ada di Provinsi DKI Jakarta dengan angka 4676,9 juta US\$.

Tahun 2008, realisasi total PMA di Indonesia mencapai angka 14871,4 juta US\$. Pada tahun tersebut, angka realisasi PMA terkecil ada di provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 0,20 juta US\$. Angka realisasi PMA terbesar pada tahun 2008 masih di provinsi DKI Jakarta dengan nilai 9927,6 juta US\$.

Pada tahun 2009 realisasi PMA tertinggi ada masih ada di provinsi DKI Jakarta dengan nilai 5510,8 juta US\$. Sementara untuk angka realisasi PMA terkecil berada pada provinsi Sumatera Barat dengan angka 0,36 juta US\$. Total realisasi PMA di Indonesia mencapai angka 10815,2 juta US\$. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya karena imbas dari krisis global yang terjadi di luar negeri. Krisis tersebut menyebabkan para investor asing menurunkan investasinya di Indonesia.

Pada tahun 2010, total realisasi PMA di Indonesia kembali meningkat yaitu mencapai angka 16214,8 juta US\$. Untuk angka realisasi terbesar ada di provinsi DKI Jakarta yaitu dengan nilai 6429,3 juta US\$. Sementara angka terkecil ada pada provinsi Gorontalo dengan angka 0,80 juta US\$.

Realisasi total PMA di Indonesia pada tahun 2011 kembali meningkat yakni mencapai angka 19474,5. Pada tahun tersebut, masih DKI Jakarta dengan angka

tertinggi realisasi PMA di Indonesia dengan nilai 4824,10 juta US\$. Kemudian angka terkecil ada di provinsi DI Yogyakarta dengan nilai 2,40 juta US\$.

Pada tahun 2012 yang merupakan tahun terakhir penelitian, didapat realisasi total PMA di Indonesia sebesar 24564,7 juta US\$. Pada tahun ini, untuk pertama kalinya dalam enam tahun masa penelitian, Jawa Barat menjadi angka tertinggi dalam realisasi PMA dengan nilai 4207,7. Sementara untuk angka terkecil ada di Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 0,31 juta US\$.

Seluruh nilai investasi asing dijadikan rupiah dengan dikalikan kurs tengah. Kurs tengah merupakan kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang terjadi di setiap tahunnya (lampiran).

Investasi yang ada di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh investor asing, investor lokal juga melakukan hal yang sama demin mendapatkan deviden di masa mendatang dan juga membantu pembangunan Indonesia menjadi sektor yang lebih baik.

Realisasi PMDN di Indonesia juga terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2007 total realisasi PMDN di Indonesia sebesar 34878,7 Milyar Rupiah dan terus meningkat di setiap tahunnya sampai penelitian terakhir mencapai angka 92182,0 Milyar Rupiah.

PMDN juga masih terpusat di Pulau Jawa saja dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Pada tabel PMDN (lampiran) menunjukkan realisasi investasi dari investor lokal di Indonesia dari tahun 2007-2012.

## B. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan diolah menggunakan program *Eviews 7.0*. Kelebihan dari program ini adalah kemampuannya dalam mengolah data panel menjadi lebih mudah, karena dapat diperlakukan sebagai data *cross section*, *time series*, maupun sebagai data panel. Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, maka penelitian ini menggunakan model *fixed effect*.

### 1. Pemilihan Model Terbaik

#### a. Pengujian Signifikansi *Common Effect/Fixed Effect*

Signifikansi model *Common Effects* atau *Fixed Effects* dapat dilakukan dengan Uji Chow.

Hipotesis

- $H_0$  : Model *common effect*
- $H_1$  : Model *fixed effect*

Dalam hal ini menggunakan alpha sebesar 5% (0,05). dengan ketentuan menolak  $H_0$  jika nilai  $p - value < \alpha$  pengujian. Dari hasil pengujian dengan *Eviews 7.0* diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.1**

#### **Pengujian Signifikansi *Common Effect/Fixed Effect***

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.855883	(32,163)	0.0000
Cross-section Chi-square	184.744521	32	0.0000

*Data olahan Eviews 7.0*

Berdasarkan hasil pengujian dengan *Eviews 7.0*, karena  $p - value$  *cross section/period* Chi-Square  $0,0000 < 0,05$  atau nilai *probability* ( $p - value$ ) *F Test*  $0,0000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak yang artinya model adalah model *fixed effect*.

#### b. Pengujian Signifikansi *Fixed Effect/Random Effect*

Signifikansi model *Fixed Effects* atau *Random Effects* dilakukan dengan Uji Hausman.

Hipotesis

- $H_0$  : Model *random effect*
- $H_1$  : Model *fixed effect*

Dalam hal ini menggunakan alpha sebesar 5% (0,05). dengan ketentuan menerima  $H_0$  jika nilai  $p - value$  *period random*  $>$  alpha. Dari hasil pengujian dengan *Eviews 7.0* diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.2**

#### **Pengujian Signifikansi *Fixed Effect/Random Effect***

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.312648	2	0.0157

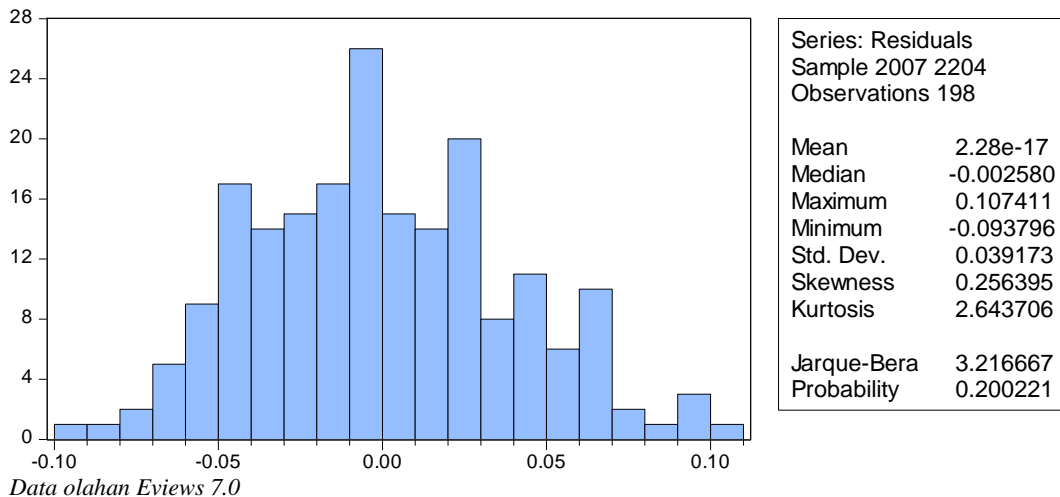
*Data olahan Eviews 7.0*

Dari hasil perhitungan didapat nilai  $p - value$  *period random*  $(0,0157) >$  alpha  $(0,05)$ , sehingga dapat diambil keputusan untuk menerima

$H_0$ , dengan kesimpulan model *fixed effect* lebih baik jika dibandingkan dengan model *random effect*.

## 2. Pengujian Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas



**Gambar IV.1**

### Uji Normalitas

Hasil *output Eviews.7.0* dari hasil histogram dan pengujian normalitas menunjukkan residual *p-value* Jarque-Bera adalah  $0,200221 > 0,05$ . Dengan demikian,  $H_0$  diterima yang artinya error mengikuti fungsi distribusi normal.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan White dengan hipotesis sebagai berikut :

- $H_0$  : Varians error bersifat homoskedastisitas
- $H_1$  : Varians error bersifat heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji uji Breuch-Pagan-Godfrey (BPG). Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut.

**Tabel IV.3****BPG heteroscedasticity consistent coefficient covariance**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.304408	Prob. F(2,195)	0.1025
Obs*R-squared	4.571670	Prob. Chi-Square(2)	0.1017
Scaled explained SS	3.644248	Prob. Chi-Square(2)	0.1617

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/25/14 Time: 17:48

Sample: 2007 2204

Included observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.005274	0.001964	2.685359	0.0079
INF	-7.19E-05	4.25E-05	-1.691623	0.0923
INV	-0.000119	6.71E-05	-1.766659	0.0788
R-squared	0.023089	Mean dependent var		0.001527
Adjusted R-squared	0.013070	S.D. dependent var		0.001962
S.E. of regression	0.001950	Akaike info criterion		-9.627376
Sum squared resid	0.000741	Schwarz criterion		-9.577554
Log likelihood	956.1102	Hannan-Quinn criter.		-9.607210
F-statistic	2.304408	Durbin-Watson stat		1.149257
Prob(F-statistic)	0.102530			

Berdasarkan metode uji BPG, nilai Obs\*R-Squared pada hasil diatas adalah 4,571670 dan nilai probabilitasnya adalah 0,1017 (lebih besar dari alpha pengujian = 0,05), maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut bersifat homoskedastisitas.

**c. Uji Multikolinearitas**

Dari data yang diolah dengan menggunakan program eviews, didapatkan hasil uji Multikolinearitas seperti yang terlihat pada Tabel IV.7 dibawah ini.

**Tabel IV. 4****Uji Multikolenearitas**

	INV	INF
INF	1.000.000	0.298613
INV	0.298613	1.000000

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa antara variabel inflasi dan investasi memiliki koefisien korelasi yang cukup kecil di bawah 0,80, yaitu 0.298613. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolenearitas antar variabel independen dalam model regresi ini.

**3. Pengujian Hipotesis****a. Uji keberartian koefisien regresi secara parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  ditentukan dengan tingkat signifikansi 5%.

**Tabel IV. 5****Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.142406	0.053885	2.642772	0.0090
INF?	-0.002618	0.000637	-4.109924	0.0001
INV?	0.008062	0.001876	4.298205	0.0000

*Data olahan Eviews 7.0*

Berdasarkan hasil uji t, berikut ini disajikan kesimpulan sebagai berikut :

### **1. Pengujian keberartian koefisien regresi secara parsial Inflasi**

Berdasarkan perhitungan *Eviews.7.0* nilai  $t_{hitung}$  untuk koefisien regresi inflasi adalah sebesar -4,10 dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tabel distribusi t dengan  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 198-2-1 = 195, hasilnya diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,65271

Dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  terlihat bahwa  $t_{hitung} (-4,109924) < t_{tabel} (-1,65271)$  yang berarti yang berarti  $H_0$  ditolak. Selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya, maka nilai signifikan dari inflasi  $(0,0001) < (0,05)$ . Dilihat dari kedua cara tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa  $H_0$  diterima yaitu secara parsial inflasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

### **2. Pengujian keberartian koefisien regresi secara parsial investasi (LnInv)**

Berdasarkan perhitungan *Eviews.7.0* nilai  $t_{hitung}$  untuk koefisien regresi investasi adalah sebesar 4,29 dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tabel distribusi t dengan  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 198-2-1 = 162, hasilnya diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,65271

Dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  terlihat bahwa  $t_{hitung} (4,298204) < t_{tabel} (1,654)$  yang berarti bahwa tingkat investasi

memiliki pengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya, maka nilai signifikan dari tingkat pendidikan adalah  $(0,0000) < (0,05)$ , maka  $H_0$  ditolak. Dilihat dari kedua cara tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan tingkat investasi terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

#### b. Uji keberartian regresi (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan secara simultan serta seberapa besar pengaruhnya antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan hipotesis secara simultan yaitu dengan melihat nilai probabilitas signifikansi. Selain itu dapat juga menggunakan perhitungan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% atau  $\alpha = 5\%$ .  $df_1$  (jumlah variabel-1) dan  $df_2$  ( $n-k-1$ ) di mana  $n$  adalah jumlah observasi dan  $k$  adalah jumlah variabel independen. Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel IV. 6**

#### **Hasil Uji F**

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.645228	Mean dependent var	0.349237
Adjusted R-squared	0.571226	S.D. dependent var	0.041248
S.E. of regression	0.027010	Akaike info criterion	-4.226216
Sum squared resid	0.118913	Schwarz criterion	-3.644956
Log likelihood	453.3953	Hannan-Quinn criter.	-3.990941
F-statistic	8.719104	Durbin-Watson stat	1.493568
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan perhitungan *Eviews.7.0* diketahui bahwa  $F_{hitung}$  (8,719104)  $>$   $F_{tabel}$  (3,04) dari tabel nilai kritis distribusi F dengan tingkat keyakinan 95% atau  $\alpha = 5\%$ , dan nilai  $df_1 = 2$  dan  $df_2 = 195$ . Selain itu, dapat dilihat nilai probabilitas signifikansi adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan kedua hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama inflasi dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dari hasil analisis koefisien korelasi berdasarkan *output Eviews.7.0* diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,571226 maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan keragaman nilai pada variabel Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan sebesar 57% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang berada di luar model penelitian.

## C. Pembahasan

Berdasarkan tahapan dan perhitungan yang telah dilakukan pada periode waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terhadap 33 provinsi di Indonesia untuk mengetahui apakah ada pengaruh investasi dan inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, peneliti dalam hal ini menggunakan estimasi model *Fixed Effects*. Penelitian ini mempunyai persamaan regresi sebagai berikut:

$$INE = 0,142 - 0,002 INF + 0,008 LnINV$$

Hasil persamaan regresi di atas memiliki nilai konstanta sebesar 0,142 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ketika inflasi dan tingkat investasi adalah konstan, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia sebesar 0,142 persen. Sedangkan untuk koefisien inflasi memiliki nilai -0,002 maka dapat diinterpretasikan bahwa ketika inflasi naik 1 % dengan asumsi *ceteris paribus*, maka ketimpangan akan mengalami penurunan sebesar 0,002 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif variabel inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Berbeda halnya dengan variabel inflasi yang memiliki pengaruh negatif, variabel investasi juga memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien variabel tingkat pendidikan sebesar 0,008 dapat diinterpretasikan bahwa ketika investasi bertambah 1% dengan asumsi *ceteris paribus*, maka ketimpangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,008 persen.

Hasil perhitungan menunjukkan  $t_{\text{statistik}}$  inflasi terlihat bahwa sebesar  $-4,109924 < t_{\text{tabel}} -1,65271$  menunjukkan pengaruh negatif inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga kondisi yang terjadi ketika inflasi naik, ketimpangan akan menurun dan sebaliknya. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penemuan terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Namun berdasarkan teori teori Romer dan Romer, mereka mengatakan, respon dinamis ukuran konsumsi serta ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Menurut mereka, jika tidak bisa menjaga dengan baik kebijakan moneter

yang dilakukan oleh pemerintah bisa mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Sementara teori Bach dan Stephenson (1974), dan Blinder dan Esaki (1978), inflasi telah didistribusikan pendapatan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terhadap pendapatan tenaga kerja. Sementara teori inflasi menurut Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini ditandai dengan permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, sehingga menimbulkan “inflationary gap”. Selama “inflationary gap” tetap ada, selama itu pula proses inflasi akan berkelanjutan. Menurut Keynes, perubahan dalam jumlah uang yang beredar tidak akan menimbulkan peningkatan pendapatan nasional. Hasil penelitian mengemukakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya, inflasi tidak berpengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi. Namun, semakin tinggi inflasi tidak diikuti dengan bertambahnya pendapatan masyarakat yang mayoritas masih berpendapatan rendah.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Hongyi Li dan Heng-Fu Zou mengemukakan bahwa adanya pengaruh positif antara inflasi, pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan. Kedua peneliti tersebut menemukan bahwa adanya determinan antara kedua variabel (inflasi dan ketimpangan pendapatan) bahwa inflasi memperburuk distribusi pendapatan, inflasi meningkatkan pangsa pendapatan orang kaya, inflasi memiliki efek

negatif tetapi tidak signifikan kepada pendapatan orang miskin dan kelas menengah, serta mengurangi laju pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya, inflasi mempunyai dampak positif serta negatif bagi perekonomian suatu negara. Dampak positif terjadi apabila inflasi dalam suatu negara tersebut itu rendah karena akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan apabila suatu negara sedang mengalami inflasi tinggi, maka itu akan menjadi dampak negatif bagi perekonomian karena pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan lebih cepat.

Dari hasil penelitian diatas, inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya semakin tinggi inflasi akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, inflasi berpengaruh negatif terhadap orang-orang yang punya pendapatan tinggi karena naiknya inflasi juga akan diikuti dengan naiknya pendapatan. Sebaliknya, pengaruh positif terjadi apabila inflasi yang tinggi diikuti oleh naiknya pendapatan. Inilah yang masih bermasalah pada negara berkembang. Artinya apabila inflasi tersebut naik, maka tingkat ketimpangan juga ikut naik karena tidak dibarengi oleh naiknya pendapatan yang diterima masyarakat yang berpendapatan rendah.

Sementara itu hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada variabel inflasi terlihat bahwa  $t_{hitung} 4,298204 < t_{tabel} 1,654$  yang berarti investasi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dapat diartikan jika investasi bertambah atau naik maka

tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pun akan bertambah, begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dunning bahwa

“FDI on both investing and host countries, especially on developing host countries. However, by analyzing these theories, the number of major impact of FDI on host country’s economic development can be concluded.”

Dia mengatakan bahwa komponen investasi bisa meningkatkan ketimpangan pendapatan pada negara yang sedang berkembang. Kemudian teori yang mengatakan adalah Bornschier yang mengatakan :

“FDI in a country means more foreign control in that country and as a consequence the greater the degree of income inequality in that country”

Menurutnya investasi merupakan sebuah konsekuensi yang bisa meningkatkan ketimpangan pendapatan di berbagai negara.

Teori yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurutnya, ketidakmerataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan ini berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar, hal ini menurut Myrdal dikarenakan oleh peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar ketimpangan mempersempit ketimpangan regional. Jika segala sesuatunya diserahkan pada kekuatan pasar, tanpa diiringi oleh intervensi kebijakan apapun, maka produksi, industri, perdagangan, perbankan, dan hampir semua kegiatan ekonomi yang di dalam suatu perekonomian sedang berkembang yang cenderung mendatangkan keuntungan akan mengelompokkan daerah

padat modal tersebut meninggalkan daerah lain yang masih kurang modal menjadi wilayah yang terbelakang.

Teori lain yang mendukung adalah teori investasi dari Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh terhadap permintaan agregat, yaitu melalui penciptaan pendapatan dan terhadap penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi.

Investasi yang bersumber dari luar negeri (PMA) dan dalam negeri (PMDN) merupakan salah satu indikator meningkatnya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut akan menjadi rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri.

Setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, umumnya sangat memperhatikan masalah distribusi pendapatan yang terjadi di negaranya. Beberapa ekonomi berpendapat bahwa perbedaan pendapat timbul karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan modal. Menurut Susanti, pihak yang memiliki barang modal lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula dibandingkan dengan pihak yang memiliki sedikit barang modal.

Begitu pula dengan teori Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (1973) yang mengemukakan delapan hal yang membuat terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang yang salah satunya menyebutkan bahwa investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.

Teori tersebut juga didukung oleh penelitian Hansen dan Tarp, mereka menemukan sebuah pola terkait investasi di negara penerima dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan mempunyai hubungan yang positif. Investasi dari luar merupakan bantuan yang akan meningkatkan tabungan dalam negeri.

Dengan kata lain investasi sebagai salah satu faktor pertumbuhan suatu negara justru akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Investasi yang seharusnya meningkatkan kesempatan kerja untuk masyarakat justru para investor tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan keuntungan pribadi..

Dari hasil regresi didapatkan pula karakteristik tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Indonesia yang tercermin pada nilai *intercept* masing – masing provinsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut

Tabel IV. 7

***Intercept* Tingkat Ketimpangan Pendapatan di provinsi Indonesia**

ACEH—C	-0.034055
SUMBAR—C	-0.033724
SUMUT—C	-0.012948
RIAU—C	-0.020811
KEPRI—C	-0.048610
JAMBI—C	-0.041273
SUMSEL—C	-0.023698
BANGKA—C	-0.041454
BGKLU—C	0.008365
LMPG—C	0.007749
BANTEN—C	-0.005951
DKI—C	-0.003397
JABAR—C	-0.001638
JATENG—C	-0.015518
JATIM—C	0.010980
DIY—C	0.014606
BALI—C	0.001910
NTB—C	0.007801
NTT—C	0.036819
KALBAR—C	-0.001309
KALTENG—C	-0.047005
KALSEL—C	0.000715
KALTIM—C	0.003881
SULUT—C	0.000699
SULTRA—C	0.053269
SULTENG—C	0.011595
SULBAR—C	-0.036149
SULSEL—C	0.043823
GRTALO—C	0.062005
MALUKU—C	0.027353
MALTARA—C	-0.008466
PAPUA—C	0.044546
PAPBAR—C	0.039889

Dari tabel dapat dilihat adanya variasi dari *intercept* masing – masing provinsi. *Intercept* digunakan untuk menjelaskan perbedaan individu melalui variabel dependen. Persamaan regresi berganda memiliki nilai *intercept* yang artinya jika  $X_1$  dan  $X_2$  berada pada nilai terendah, maka Y akan mengalami pertumbuhan sebesar nilai *intercept* tersebut. Dimana dalam *intercept* yang ditunjukkan pada tabel terdapat ketidakmerataan ketimpangan pendapatan antar

provinsi di Indonesia. Gorontalo memiliki *intercept* tertinggi sebesar 0.062005 yang artinya jika inflasi dan investasi berada pada nilai terendah maka akan menghasilkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.062005. Provinsi lain yang memiliki *intercept* tinggi adalah provinsi Papua yaitu sebesar 0.044546, kemudian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.043823.

Sedangkan *intercept* terendah berada di provinsi Kepulauan Riau dengan nilai *intercept* sebesar -0,048610, kemudian selanjutnya provinsi Kalimantan Tengah sebesar -0,047005, dan Provinsi Kepulauan Bangka sebesar -0,041454. Tanda positif berarti daerah tersebut memiliki nilai tingkat ketimpangan pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor – faktor yang terdapat dalam model (inflasi dan investasi), sementara tanda negatif berarti daerah tersebut tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tergantung kepada variabel model.

Secara simultan dengan pengujian  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan  $F_{tabel}$ , diperoleh nilai  $F_{hitung} = 9,178$  sedangkan  $F_{tabel} 3,05$ . Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka dengan tingkat kepercayaan 95% inflasi dan investasi mempengaruhi secara bersama – sama terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara  $R^2$  juga menunjukkan angka sebesar 0.57 atau sebesar 57% model penelitian ini dikatakan baik.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya sampai pada kebenaran mutlak. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian, antara lain:

1. Unsur variabel yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan sangat luas, namun peneliti hanya menggunakan dua variabel. Hasil penghitungan yang menyatakan bahwa 57% variabel independen mempengaruhi variabel dependennya dirasakan sudah cukup baik, karena pengaruh dua dari banyak variabel independen terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Peneliti melakukan penelitian dalam jangka waktu yang pendek yaitu jangka waktu 6 tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Penelitian hanya dilakukan dalam jangka waktu tersebut karena adanya keterbatasan biaya dan data.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat inflasi juga mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 33 Provinsi di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan, investasi berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.
2. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.
3. Investasi dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya adalah sebagai berikut :

1. Investasi memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan

dapat mengalami penurunan apabila investasi digunakan dengan baik. Di banyak negara berkembang, yaitu negara padat modal, investasi hanya hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki banyak modal tanpa memperhatikan daerah yang masih ada di wilayah tertinggal. Dengan demikian, investasi yang tinggi di suatu provinsi akan berdampak pada naiknya tingkat ketimpangan.

2. Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan di Indonesia. Meningkatnya inflasi akan mengakibatkan turunnya tingkat ketimpangan. Apabila inflasi menurun maka ketimpangan di suatu wilayah akan meningkat atau dengan kata lain kecil. Hal ini bisa terjadi jika inflasi tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi. masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi cenderung tidak akan berpengaruh oleh tingkat inflasi yang terjadi. Namun, inflasi akan lebih berpengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah.

### **C. Saran**

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan kesimpulan bahwa jumlah investasi mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia, selain meningkatkan produktivitas tenaga kerja, Pemerintah Provinsi di Indonesia perlu meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan cara

memberikan insentif bagi para pengusaha agar tertarik menanamkan investasinya di daerah, bentuk insentif tersebut dapat berupa kemudahan dalam mendirikan usaha baru. Selain itu investasi yang dilakukan harus mencermati sektor ekonomi yang mana yang perlu dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah untuk memperkecil kesenjangan aktivitas perekonomian antar provinsi. Investasi juga harus memperhatikan daerah yang masih tertinggal agar mereka mendapatkan dampaknya, juga bagi para masyarakat, adanya investasi seharusnya juga meningkatkan kesempatan kerja agar produktivitas dan pendapatan mereka bisa meningkat lalu bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan naiknya pertumbuhan ekonomi.

2. Pemerintah diharapkan menjaga stabilitas perekonomian agar tidak terjadi inflasi yang merugikan masyarakat. Kebijakan moneter yang dilakukan haruslah tepat agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia tetap diutamakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albanesi, S. Et al, 2007, Inflation and inequality, *Journal of Monetary Economics* Vol. 54 2007
- Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Gunadarma. 1993
- Badan Pusat Statistik, *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan*
- Badan Pusat Statistik, *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah*, 2000
- Gujarati, Damodar. *Ekonometrika Dasar*, Jakarta, Erlangga, 1978
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1999
- Eddy Soegiarto dan Mardiyono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Tangerang Selatan: Mahkota Ilmu, 2011
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Moch. Doddy Ariefianto. *Ekonometrika*, Jakarta, Erlangga ; 2012
- Sikumbang Novrizal. *90 Persen Perekonomian Indonesia dikuasai Asing*  
<http://www.aktual.co/hukum/17323190-persen-perekonomian-indonesia-dikuasai-asing-> (diakses pada Selasa, 13 Mei 2014, pukul 13.30 WIB)
- Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010*  
[http://bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=12&notab=1](http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1) (diakses pada Selasa, 13 Mei 2014, pukul 13.30 WIB)
- R. Dornbuch, S. Fischer, R. Starz, *Macro Economic*. Jakarta: Erlangga. 2003
- Rahardja Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: FE UI. 2008
- Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner dan Dauglas D. Purvis, *Pengantar Makroekonomi* (Jakarta: Erlangga., 1999),
- Richard T. Troyen, *Macroeconomics* New Jersey: *Pretice hall international, inc.* 2004

- Sadono Sukirno, *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Setiawan, Adi. *Rahasia Terbesar Investasi*. Jakarta. Jakarta: Alfabeta. 2012
- Sofyan Yamin, Lien A. Ravhmach dan Heri Kurniawan. *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda*. Jakarta: Salemba Empat
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Alfabeta. 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: ALFABETA cv, 2010
- Sumei Tang, Saroja Selvanathan, et al. *Foreign Direct Investment and Regional Income Inequality in China*, Australia: University Nathan, 2005
- Suparmoko dan Irawan, *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam*, Yogyakarta:BPFE-UGM, 2008
- Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2000
- Tri Kunawangsih dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2005
- Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi & Utang Luar Negeri*, (Jakarta: Rajawali Press. 2008)
- Sikumbang Zul. *Indonesia masih alami masalah soal investasi dan hukum*  
<http://www.antaraneews.com/berita/328050/indonesia-masih-alami-masalah-soal-investasi-dan-hukum> (diakses pada 13 Mei 2014 pukul 13.00 WIB)

**Tabel 1****Indeks Gini Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2012**

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	0,26	0,27	0,29	0,30	0,33	0,32
Sumatera Utara	0,30	0,31	0,32	0,35	0,35	0,33
Sumatera Barat	0,30	0,29	0,30	0,33	0,35	0,36
Riau	0,32	0,31	0,33	0,33	0,36	0,40
Jambi	0,30	0,28	0,27	0,30	0,34	0,34
Sumatera Selatan	0,31	0,30	0,31	0,34	0,34	0,40
Bengkulu	0,33	0,33	0,30	0,37	0,36	0,35
Lampung	0,39	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36
Kep. Bangka Belitung	0,25	0,26	0,29	0,30	0,30	0,29
Kep. Riau	0,30	0,30	0,29	0,29	0,32	0,35
DKI Jakarta	0,33	0,33	0,36	0,36	0,44	0,42
Jawa Barat	0,34	0,35	0,36	0,36	0,41	0,41
Jawa Tengah	0,32	0,31	0,32	0,34	0,38	0,38
DI Yogyakarta	0,36	0,36	0,38	0,41	0,40	0,43
Jawa Timur	0,33	0,33	0,33	0,34	0,37	0,36
Banten	0,36	0,34	0,37	0,42	0,40	0,39
Bali	0,33	0,30	0,31	0,37	0,41	0,43
NTB	0,32	0,33	0,35	0,40	0,36	0,35
NTT	0,35	0,34	0,36	0,38	0,36	0,36
Kalimantan Barat	0,30	0,31	0,32	0,37	0,40	0,38
Kalimantan Tengah	0,29	0,29	0,29	0,30	0,34	0,33
Kalimantan Selatan	0,34	0,33	0,35	0,37	0,37	0,38
Kalimantan Timur	0,33	0,34	0,38	0,37	0,38	0,36
Sulawesi Utara	0,32	0,28	0,31	0,37	0,39	0,43
Sulawesi Tengah	0,32	0,33	0,34	0,37	0,38	0,40
Sulawesi Selatan	0,37	0,36	0,39	0,40	0,41	0,41
Sulawesi Tenggara	0,35	0,33	0,36	0,42	0,41	0,40
Gorontalo	0,38	0,34	0,35	0,43	0,46	0,44
Sulawesi Barat	0,31	0,31	0,30	0,36	0,34	0,31
Maluku	0,32	0,31	0,31	0,33	0,41	0,38
Maluku Utara	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34
Papua Barat	0,29	0,31	0,35	0,38	0,40	0,43
Papua	0,41	0,40	0,38	0,41	0,42	0,44
<b>INDONESIA</b>	<b>0,36</b>	<b>0,35</b>	<b>0,37</b>	<b>0,38</b>	<b>0,41</b>	<b>0,413</b>

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Tabel 2**  
**PMA Per Provinsi di Indonesia (Dalam Juta US\$)**

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	17,40	1,70	0,4	4,6	22,5	172,3
Sumatera Utara	189,70	127,20	139,7	181,1	753,70	645,3
Sumatera Barat	58,70	28,10	0,36	7,9	22,9	75,0
Riau	724,00	460,90	251,6	86,6	212,3	1152,9
Kep. Riau	52,80	161,40	230,7	165,7	219,70	537,1
Jambi	17,60	36,10	40,5	37,2	19,50	156,3
Sumatera Selatan	213,80	114,70	56,8	186,3	557,3	786,4
Kep. Bangka Belitung	1,15	1,70	22,4	22,0	146,0	59,2
Bengkulu	5,90	13,00	1,1	25,1	43,10	30,4
Lampung	124,50	67,00	32,7	30,7	79,5	114,3
DKI Jakarta	4676,9	9927,6	5510,8	6429,3	4824,10	4107,7
Jawa Barat	1326,9	2552,2	1934,4	1692,0	3839,4	4210,7
Banten	708,60	477,70	1412,0	1544,2	2171,70	2716,3
Jawa Tengah	100,70	135,60	83,1	59,1	175,0	241,5
DI Yogyakarta	0,80	16,70	8,1	4,9	2,40	84,9
Jawa Timur	1689,6	457,10	422,1	1769,2	1312,0	2298,8
Bali	50,40	81,00	227,2	278,3	482,1	482,0
NTB	5,90	14,40	2,9	220,5	465,1	635,8
NTT	0,40	1,40	4,0	3,8	5,5	8,7
Kalimantan Barat	11,20	39,80	27,8	170,4	500,70	397,5
Kalimantan Tengah	77,60	62,70	4,9	546,6	543,70	524,7
Kalimantan Selatan	59,80	0,20	171,8	202,2	272,1	272,3
Kalimantan Timur	152,00	12,60	79,9	1092,2	602,40	2014,1
Sulawesi Utara	9,70	35,50	57,7	226,8	220,2	46,7
Gorontalo	1,04	0,98	0,77	0,8	12,5	35,3
Sulawesi Tengah	7,10	1,50	3,3	138,5	370,40	806,5
Sulawesi Selatan	62,80	27,90	77,0	441,8	89,6	582,6
Sulawesi Barat	17,87	17,00	28,90	37,3	5,60	0,31
Sulawesi Tenggara	0,89	0,50	3,6	14,0	17,0	35,7
Maluku	0,29	1,59	2,07	2,9	11,70	8,5
Maluku Utara	0,78	2,90	5,9	246,0	129,8	90,3
Papua	0,40	17,80	1,8	329,6	1312,00	1202,4
Papua Barat	2,00	0,90	1,0	17,2	33,10	32,0
<b>Indonesia</b>	<b>10341,4</b>	<b>14871,4</b>	<b>10815,2</b>	<b>16214,8</b>	<b>19474,5</b>	<b>24564,7</b>

Sumber: [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)

**Tabel 3**  
**PMDN Per Provinsi di Indonesia (Dalam Milyar Rupiah)**

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	22,89	Rp36,00	79,7	40,9	259,4	60,2
Sumatera Utara	1521,3	Rp382,70	2060,7	662,7	1673,0	2550,3
Sumatera Barat	64,58	Rp59,68	459,0	73,8	Rp1.026,20	885,3
Riau	3095,3	Rp1.966,80	3386,0	1037,1	7462,6	5450,3
Kep. Riau	97,1	Rp74,40	240,0	166,9	Rp1.370,40	43,5
Jambi	4751,8	Rp1.300,60	213,9	223,3	Rp2.134,90	1445,7
Sumatera Selatan	811,5	Rp378,50	580,3	1738,4	1068,9	2930,6
Kep. Bangka Belitung	313,7	Rp2,00	249,3	0,4	514,4	533,5
Bengkulu	1,68	Rp2,68	Rp3,67	8,5	Rp29,84	52,6
Lampung	163,8	Rp735,20	549,9	272,3	Rp824,40	304,2
DKI Jakarta	4218	Rp1.837,30	9693,8	4598,5	9256,4	8540,1
Jawa Barat	11347,9	Rp4.289,50	4724,9	15799,8	11194,3	11384,0
Banten	1068,7	Rp1.989,10	4381,7	5852,5	4298,6	5117,5
Jawa Tengah	276,5	Rp1.336,30	2642,6	795,4	Rp2.737,80	5797,1
DI Yogyakarta	33,1	Rp17,55	32,9	10,0	1,6	334,0
Jawa Timur	1724,7	Rp2.778,30	4290,7	8084,1	9687,5	21520,3
Bali	15,7	Rp29,00	50,8	313,4	Rp313,40	3108,0
NTB	44,81	Rp39,48	Rp31,30	1805,8	42,3	45,4
NTT	0,09	Rp0,03	Rp0,07	0,1	1,0	14,4
Kalimantan Barat	287,0	Rp248,10	517,1	1171,7	1404,0	2811,0
Kalimantan Tengah	447,0	Rp681,90	1464,2	3507,7	3376,0	4529,6
Kalimantan Selatan	384,0	Rp592,70	870,9	2015,0	Rp2.118,30	3509,8
Kalimantan Timur	440,0	Rp298,70	82,2	7881,3	6569,1	5889,3
Sulawesi Utara	624,0	Rp42,20	49,5	95,8	331,6	678,5
Gorontalo	4,809	Rp9,57	Rp10,22	16,7	11,8	164,9
Sulawesi Tengah	487,6	Rp78,94	Rp117,57	153,6	2620,2	602,8
Sulawesi Selatan	1,1	Rp1.105,20	1137,8	3212,3	Rp3.986,30	2318,9
Sulawesi Barat	89,04	Rp128,90	Rp370,84	840,0	Rp218,60	228,6
Sulawesi Tenggara	768,9	Rp8,48	Rp12,87	19,2	Rp59,00	907,3
Maluku	0,016	Rp0,01	Rp0,07	Rp0,12	0,1	3,4
Maluku Utara	2,31	Rp11,94	Rp6,71	Rp15,77	13,5	320,5
Papua	328,79	Rp294,70	41,0	178,0	Rp1.378,90	54,7
Papua Barat	8,76	Rp12,99	Rp29,43	51,3	Rp47,20	45,8
<b>Indonesia</b>	<b>34878,7</b>	<b>20363,4</b>	<b>37799,8</b>	<b>60626,3</b>	<b>76000,70</b>	<b>92182,0</b>

Sumber: [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)

**Tabel 4**  
**Inflasi per Provinsi di Indonesia (Dalam %)**

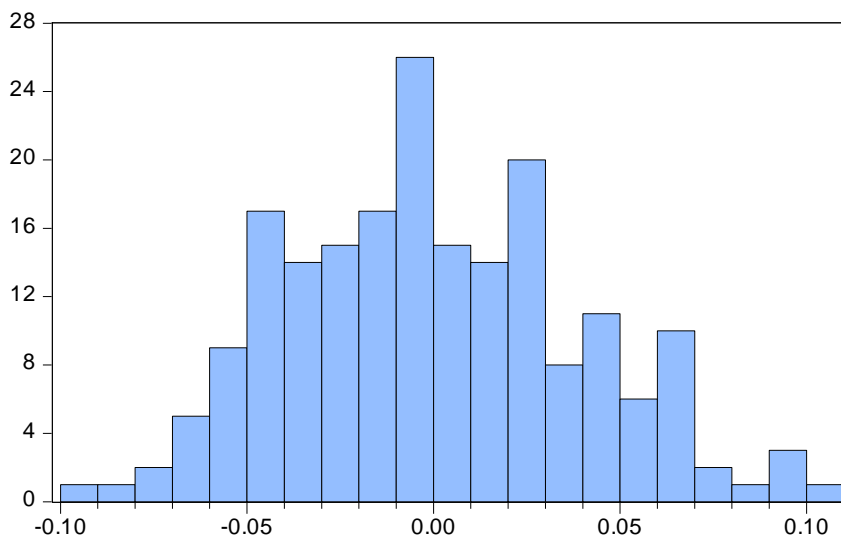
PROVINSI	TAHUN					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Di Aceh	7,59	12,02	3,72	5,86	3,43	0,22
Sumatra Utara	7,31	11,05	2,33	8,00	3,67	3,86
Sumatra Barat	6,38	11,66	0,91	7,61	5,38	4,11
Riau	7,53	11,66	1,37	7,00	5,09	3,35
Kep. Riau	4,84	8,08	1,65	4,49	2,97	2,38
Jambi	7,42	11,57	2,49	10,52	2,72	4,22
Kep. Bangka	8,21	18,40	2,17	9,36	5,00	6,57
Sumatera Selatan	2,64	11,15	1,85	5,88	3,84	2,68
Bengkulu	5,00	13,44	2,88	9,08	3,96	4,61
Bandar Lampung	6,58	14,82	4,18	9,95	4,24	4,30
Dki Jakarta	6,04	11,11	2,34	6,21	3,97	4,52
Banten	6,94	12,54	3,39	6,13	2,97	4,25
Jawa Barat	6,31	11,97	2,75	6,45	3,08	3,51
Jawa Tengah	6,26	11,94	3,62	6,63	2,69	3,88
Jawa Timur	7,99	10,53	3,38	6,84	3,75	4,65
Di Yogyakarta	6,57	9,88	2,93	7,38	3,88	4,31
Bali	5,91	9,25	4,37	8,10	3,75	4,71
NTB	8,76	13,68	3,61	8,71	6,78	3,85
NTT	8,44	13,27	5,85	9,22	5,45	5,79
Kalimantan Barat	8,56	11,92	3,03	7,81	5,81	5,41
Kalimantan Tengah	7,76	10,27	2,12	9,51	4,44	5,71
Kalimantan Timur	7,78	14,61	4,95	7,43	6,37	5,73
Kalimantan Selatan	8,22	11,62	3,86	9,06	3,98	5,96
Sulawesi Barat	10,13	11,66	1,78	5,12	4,91	3,28
Sulawesi Utara	7,02	9,71	2,31	6,28	0,67	6,04
Sulawesi Tengah	8,13	10,40	5,73	6,40	4,47	5,87
Sulawesi Selatan	5,71	14,23	3,91	5,83	2,94	3,95
Sulawesi Tenggara	5,91	15,28	4,60	3,87	5,09	5,23
Gorontalo	7,53	9,20	4,35	7,43	4,08	5,31
Maluku	5,85	12,16	6,48	8,78	2,85	6,73
Maluku Utara	10,43	11,25	3,88	5,32	4,52	3,29
Papua	10,35	12,55	1,92	4,48	3,40	4,52
Papua Barat	8,13	20,03	5,06	6,40	2,27	5,00
Indonesia	7,22	12,21	3,33	7,19	4,01	4,48

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**UJI NORMALITAS**

Dependent Variable: GNI  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/25/14 Time: 17:45  
 Sample: 2007 2204  
 Included observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.265976	0.039668	6.705012	0.0000
INF	-0.002423	0.000858	-2.823349	0.0052
INV	0.003562	0.001355	2.628703	0.0093
R-squared	0.098077	Mean dependent var		0.349237
Adjusted R-squared	0.088826	S.D. dependent var		0.041248
S.E. of regression	0.039374	Akaike info criterion		-3.616395
Sum squared resid	0.302308	Schwarz criterion		-3.566573
Log likelihood	361.0231	Hannan-Quinn criter.		-3.596228
F-statistic	10.60232	Durbin-Watson stat		0.714471
Prob(F-statistic)	0.000043			



Series: Residuals Sample 2007 2204 Observations 198	
Mean	2.28e-17
Median	-0.002580
Maximum	0.107411
Minimum	-0.093796
Std. Dev.	0.039173
Skewness	0.256395
Kurtosis	2.643706
Jarque-Bera	3.216667
Probability	0.200221

**UJI HETEROSKEDASTISITAS (BPG)**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.304408	Prob. F(2,195)	0.1025
Obs*R-squared	4.571670	Prob. Chi-Square(2)	0.1017
Scaled explained SS	3.644248	Prob. Chi-Square(2)	0.1617

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/25/14 Time: 17:48

Sample: 2007 2204

Included observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.005274	0.001964	2.685359	0.0079
INF	-7.19E-05	4.25E-05	-1.691623	0.0923
INV	-0.000119	6.71E-05	-1.766659	0.0788
R-squared	0.023089	Mean dependent var		0.001527
Adjusted R-squared	0.013070	S.D. dependent var		0.001962
S.E. of regression	0.001950	A		
Sum squared resid	0.000741	kaike info criterion		-9.627376
Log likelihood	956.1102	Schwarz criterion		-9.577554
F-statistic	2.304408	Hannan-Quinn criter.		-9.607210
Prob(F-statistic)	0.102530	Durbin-Watson stat		1.149257

**UJI MULTIKOLINEARITAS**

	INF	INV
INF	1.000000	0.298613
INV	0.298613	1.000000

**Common Effect Test**

Dependent Variable: GNI?

Method: Pooled Least Squares

Date: 12/26/14 Time: 20:08

Sample: 2007 2012

Included observations: 6

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.265976	0.039668	6.705012	0.0000
INF?	-0.002423	0.000858	-2.823349	0.0052
INV?	0.003562	0.001355	2.628703	0.0093

R-squared	0.098077	Mean dependent var	0.349237
Adjusted R-squared	0.088826	S.D. dependent var	0.041248
S.E. of regression	0.039374	Akaike info criterion	-3.616395
Sum squared resid	0.302308	Schwarz criterion	-3.566573
Log likelihood	361.0231	Hannan-Quinn criter.	-3.596228
F-statistic	10.60232	Durbin-Watson stat	0.515589
Prob(F-statistic)	0.000043		

### Fixed Effect Test

Dependent Variable: GNI?

Method: Pooled Least Squares

Date: 12/26/14 Time: 20:08

Sample: 2007 2012

Included observations: 6

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.142406	0.053885	2.642772	0.0090
INF?	-0.002618	0.000637	-4.109924	0.0001
INV?	0.008062	0.001876	4.298205	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH—C	-0.041282			
_SUMUT—C	-0.031455			
_SUMBAR—C	-0.024364			
_RIAU—C	-0.022210			
_KEPRI—C	-0.054450			
_JAMBI—C	-0.019650			
_SUMSEL—C	-0.018412			
_BANGKA—C	0.025711			
_BGKLU—C	-0.051944			
_LMPG—C	-0.037630			
_DKI—C	-0.006138			
_JABAR—C	-0.006936			
_BANTEN—C	-0.030129			
_JATENG—C	0.030572			
_DIY—C	0.011060			
_JATIM—C	0.008855			
_BALI—C	0.002406			
_NTB—C	0.005690			
_NTT—C	0.044190			
_KALBAR—C	-0.002151			
_KALTENG—C	-0.050078			
_KALSEL—C	0.004709			
_KALTIM—C	0.004163			
_SULUT—C	0.000400			
_GRTALO--C	0.029872			
_SULTENG--C	0.043762			
_SULSEL--C	0.020325			
_SULBAR--C	0.058988			
_SULTRA--C	-0.014820			

_MALUKU--C	0.027325
_MALTARA--C	-0.000824
_PAPUA--C	0.009846
_PAPBAR--C	0.084596

---



---

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.645228	Mean dependent var	0.349237
Adjusted R-squared	0.571226	S.D. dependent var	0.041248
S.E. of regression	0.027010	Akaike info criterion	-4.226216
Sum squared resid	0.118913	Schwarz criterion	-3.644956
Log likelihood	453.3953	Hannan-Quinn criter.	-3.990941
F-statistic	8.719104	Durbin-Watson stat	1.493568
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

### Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.855883	(32,163)	0.0000
Cross-section Chi-square	184.744521	32	0.0000

---



---

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: GNI?

Method: Panel Least Squares

Date: 12/26/14 Time: 20:09

Sample: 2007 2012

Included observations: 6

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.265976	0.039668	6.705012	0.0000
INF?	-0.002423	0.000858	-2.823349	0.0052
INV?	0.003562	0.001355	2.628703	0.0093

---



---

R-squared	0.098077	Mean dependent var	0.349237
Adjusted R-squared	0.088826	S.D. dependent var	0.041248
S.E. of regression	0.039374	Akaike info criterion	-3.616395
Sum squared resid	0.302308	Schwarz criterion	-3.566573
Log likelihood	361.0231	Hannan-Quinn criter.	-3.596228
F-statistic	10.60232	Durbin-Watson stat	0.515589
Prob(F-statistic)	0.000043		

---



---

Dependent Variable: GNI?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/26/14 Time: 20:11

Sample: 2007 2012

Included observations: 6

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 198

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.194878	0.045238	4.307881	0.0000
INF?	-0.002738	0.000622	-4.404870	0.0000
INV?	0.006198	0.001562	3.968751	0.0001
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	-0.038259			
_SUMUT--C	-0.025114			
_SUMBAR--C	-0.021674			
_RIAU--C	-0.016284			
_KEPRI--C	-0.045891			
_JAMBI--C	-0.015846			
_SUMSEL--C	-0.014195			
_BANGKA--C	0.020322			
_BGKLU--C	-0.047257			
_LMPG--C	-0.032246			
_DKI--C	0.000607			
_JABAR--C	-0.000339			
_BANTEN--C	-0.021602			
_JATENG--C	0.028063			
_DIY--C	0.006213			
_JATIM--C	0.011734			
_BALI--C	0.003244			
_NTB--C	0.005215			
_NTT--C	0.032006			
_KALBAR--C	-0.001204			
_KALTENG--C	-0.041052			
_KALSEL--C	0.005004			
_KALTIM--C	0.005926			
_SULUT--C	0.000206			
_GRTALO--C	0.021427			
_SULTENG--C	0.037173			
_SULSEL--C	0.018636			
_SULBAR--C	0.049012			
_SULTRA--C	-0.015282			
_MALUKU--C	0.017553			
_MALTARA--C	-0.003602			
_PAPUA--C	0.008791			
_PAPBAR--C	0.068713			

## Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.026988	0.4996
Idiosyncratic random	0.027010	0.5004

## Weighted Statistics

R-squared	0.217756	Mean dependent var	0.132091
-----------	----------	--------------------	----------

Adjusted R-squared	0.209733	S.D. dependent var	0.030871
S.E. of regression	0.027444	Sum squared resid	0.146863
F-statistic	27.14146	Durbin-Watson stat	1.173202
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

Unweighted Statistics

---

R-squared	0.076006	Mean dependent var	0.349237
Sum squared resid	0.309706	Durbin-Watson stat	0.556336

---

### UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

---

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.312648	2	0.0157

---

Cross-section random effects test comparisons:

---

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
INF?	-0.002618	-0.002738	0.000000	0.3918
INV?	0.008062	0.006198	0.000001	0.0728

---

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: GNI?

Method: Panel Least Squares

Date: 12/26/14 Time: 20:12

Sample: 2007 2012

Included observations: 6

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 198

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.142406	0.053885	2.642772	0.0090
INF?	-0.002618	0.000637	-4.109924	0.0001
INV?	0.008062	0.001876	4.298205	0.0000

---

Effects Specification

---

Cross-section fixed (dummy variables)

---

R-squared	0.645228	Mean dependent var	0.349237
Adjusted R-squared	0.571226	S.D. dependent var	0.041248
S.E. of regression	0.027010	Akaike info criterion	-4.226216
Sum squared resid	0.118913	Schwarz criterion	-3.644956
Log likelihood	453.3953	Hannan-Quinn criter.	-3.990941
F-statistic	8.719104	Durbin-Watson stat	1.493568
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

**Data Olah Eviews 1**

<b>Provinsi</b>	<b>Tahun</b>	<b>GNI</b>	<b>INF</b>	<b>INV</b>
_Aceh	2007	0,27	7,59	25,95
_Aceh	2008	0,27	12,02	24,72
_Aceh	2009	0,29	3,72	25,10
_Aceh	2010	0,30	5,86	25,13
_Aceh	2011	0,33	3,43	26,86
_Aceh	2012	0,32	0,22	28,18
_SumUt	2007	0,31	7,31	28,83
_SumUt	2008	0,31	11,66	28,21
_SumUt	2009	0,32	0,91	28,36
_SumUt	2010	0,35	7,61	28,46
_SumUt	2011	0,35	5,38	29,77
_SumUt	2012	0,33	4,11	29,80
_SumBar	2007	0,31	6,38	27,15
_SumBar	2008	0,29	11,05	26,63
_SumBar	2009	0,30	2,33	28,20
_SumBar	2010	0,33	8,00	25,70
_SumBar	2011	0,35	3,67	27,84
_SumBar	2012	0,36	3,86	28,11
_Riau	2007	0,32	7,53	29,93
_Riau	2008	0,31	11,66	29,58
_Riau	2009	0,33	1,37	28,85
_Riau	2010	0,33	7,00	28,23
_Riau	2011	0,36	5,09	29,87
_Riau	2012	0,40	3,35	30,44
_KepRi	2007	0,31	4,84	27,11
_KepRi	2008	0,28	8,08	28,24
_KepRi	2009	0,27	1,65	28,59
_KepRi	2010	0,30	4,49	28,14
_KepRi	2011	0,34	2,97	28,84
_KepRi	2012	0,34	2,38	29,29
_Jambi	2007	0,32	7,42	29,22
_Jambi	2008	0,30	11,57	28,16
_Jambi	2009	0,31	2,49	28,50
_Jambi	2010	0,34	10,52	27,05

_Jambi	2011	0,34	2,72	28,47
_Jambi	2012	0,40	4,22	28,72

_SumSel	2007	0,34	8,21	28,67
_SumSel	2008	0,33	11,15	28,12
_SumSel	2009	0,30	1,85	27,59
_SumSel	2010	0,37	5,88	28,86
_SumSel	2011	0,36	3,84	29,44
_SumSel	2012	0,35	2,68	29,99
_Bangka	2007	0,39	2,64	26,51
_Bangka	2008	0,35	18,40	23,75
_Bangka	2009	0,35	2,17	27,39
_Bangka	2010	0,36	9,36	26,01
_Bangka	2011	0,37	5,00	28,24
_Bangka	2012	0,36	6,57	27,73
_Bgklu	2007	0,26	5,00	24,77
_Bgklu	2008	0,26	13,44	25,70
_Bgklu	2009	0,29	2,88	26,09
_Bgklu	2010	0,30	9,08	26,18
_Bgklu	2011	0,30	3,96	26,77
_Bgklu	2012	0,29	4,61	26,57
_Lmpg	2007	0,30	6,58	27,92
_Lmpg	2008	0,30	14,82	28,02
_Lmpg	2009	0,29	4,18	27,05
_Lmpg	2010	0,29	9,95	27,03
_Lmpg	2011	0,32	4,24	28,07
_Lmpg	2012	0,35	4,30	27,97
_DKI	2007	0,34	6,04	31,51
_DKI	2008	0,33	12,54	32,34
_DKI	2009	0,36	3,39	29,93
_DKI	2010	0,36	6,13	31,76
_DKI	2011	0,44	2,97	31,60
_DKI	2012	0,42	4,25	31,51
_JaBar	2007	0,34	6,94	30,80
_JaBar	2008	0,35	11,11	31,10
_JaBar	2009	0,36	2,34	31,67
_JaBar	2010	0,36	6,21	31,07

_JaBar	2011	0,41	3,97	31,46
_JaBar	2012	0,41	4,52	31,58

_Banten	2007	0,33	6,31	29,68
_Banten	2008	0,31	11,97	29,61
_Banten	2009	0,32	2,75	30,75
_Banten	2010	0,34	6,45	30,61
_Banten	2011	0,38	3,08	30,81
_Banten	2012	0,38	3,51	31,08
_JaTeng	2007	0,37	6,26	27,83
_JaTeng	2008	0,36	11,94	28,67
_JaTeng	2009	0,38	3,62	30,40
_JaTeng	2010	0,41	6,63	27,91
_JaTeng	2011	0,40	2,69	29,10
_JaTeng	2012	0,43	3,88	29,73
_DIY	2007	0,34	7,99	24,43
_DIY	2008	0,33	10,53	26,02
_DIY	2009	0,33	3,38	27,43
_DIY	2010	0,34	6,84	24,71
_DIY	2011	0,37	3,75	23,87
_DIY	2012	0,36	4,65	27,78
_JaTim	2007	0,37	6,57	30,50
_JaTim	2008	0,34	9,88	29,68
_JaTim	2009	0,37	2,93	29,11
_JaTim	2010	0,42	7,38	30,81
_JaTim	2011	0,40	3,88	30,70
_JaTim	2012	0,39	4,31	31,41
_Bali	2007	0,33	5,91	26,92
_Bali	2008	0,30	9,25	27,54
_Bali	2009	0,31	4,37	29,02
_Bali	2010	0,37	8,10	28,67
_Bali	2011	0,41	3,75	29,18
_Bali	2012	0,43	4,71	29,68
_NTB	2007	0,33	8,76	25,33
_NTB	2008	0,33	13,68	26,01
_NTB	2009	0,35	3,61	28,40
_NTB	2010	0,40	8,71	28,96

_NTB	2011	0,36	6,78	29,08
_NTB	2012	0,35	3,85	29,45

_NTT	2007	0,35	8,44	22,07
_NTT	2008	0,34	13,27	23,46
_NTT	2009	0,36	5,85	24,03
_NTT	2010	0,38	9,22	24,26
_NTT	2011	0,36	5,45	24,65
_NTT	2012	0,36	5,79	25,31
_KalBar	2007	0,31	8,56	26,70
_KalBar	2008	0,31	11,92	27,25
_KalBar	2009	0,32	3,03	27,04
_KalBar	2010	0,37	7,81	28,63
_KalBar	2011	0,40	5,81	29,41
_KalBar	2012	0,38	5,41	29,53
_KalTeng	2007	0,30	7,76	27,79
_KalTeng	2008	0,29	10,27	27,94
_KalTeng	2009	0,29	2,12	28,18
_KalTeng	2010	0,30	9,51	29,76
_KalTeng	2011	0,34	4,44	29,75
_KalTeng	2012	0,33	5,71	29,89
_KalSel	2007	0,34	7,78	27,58
_KalSel	2008	0,33	11,62	27,11
_KalSel	2009	0,35	3,86	27,54
_KalSel	2010	0,37	9,06	28,97
_KalSel	2011	0,37	3,98	29,15
_KalSel	2012	0,38	5,96	29,45
_KalTim	2007	0,33	8,22	28,26
_KalTim	2008	0,34	14,61	26,80
_KalTim	2009	0,38	4,95	28,16
_KalTim	2010	0,37	7,43	30,50
_KalTim	2011	0,38	6,37	30,12
_KalTim	2012	0,36	5,73	30,86
_SulUt	2007	0,32	10,13	27,30
_SulUt	2008	0,28	9,71	26,79
_SulUt	2009	0,31	2,31	27,41
_SulUt	2010	0,37	6,28	28,39

_SulUt	2011	0,39	0,67	28,48
_SulUt	2012	0,43	6,04	27,75

_Grtalo	2007	0,32	7,02	23,40
_Grtalo	2008	0,33	15,28	23,73
_Grtalo	2009	0,34	4,60	27,04
_Grtalo	2010	0,37	3,87	23,90
_Grtalo	2011	0,38	5,09	25,55
_Grtalo	2012	0,40	5,23	26,95
_SulTeng	2007	0,37	8,13	27,04
_SulTeng	2008	0,36	10,40	25,28
_SulTeng	2009	0,39	5,73	25,55
_SulTeng	2010	0,40	6,40	27,97
_SulTeng	2011	0,41	4,47	29,42
_SulTeng	2012	0,41	5,87	29,76
_SulSel	2007	0,35	5,71	27,11
_SulSel	2008	0,33	11,66	27,98
_SulSel	2009	0,36	1,78	27,79
_SulSel	2010	0,42	5,12	29,60
_SulSel	2011	0,41	4,91	29,20
_SulSel	2012	0,40	3,28	29,70
_SulBar	2007	0,39	5,91	26,27
_SulBar	2008	0,34	14,23	26,48
_SulBar	2009	0,35	3,91	27,72
_SulBar	2010	0,43	5,83	27,79
_SulBar	2011	0,46	2,94	26,32
_SulBar	2012	0,44	3,95	26,16
_SulTra	2007	0,31	7,53	27,38
_SulTra	2008	0,31	9,20	23,36
_SulTra	2009	0,30	4,35	26,37
_SulTra	2010	0,36	7,43	25,70
_SulTra	2011	0,34	4,08	26,09
_SulTra	2012	0,31	5,31	27,86

_Maluku	2007	0,33	5,85	21,73
_Maluku	2008	0,31	12,16	23,58
_Maluku	2009	0,31	6,48	24,25
_Maluku	2010	0,33	8,78	23,99
_Maluku	2011	0,41	2,85	25,39
_Maluku	2012	0,38	6,73	25,17
_MalTara	2007	0,33	10,43	22,99
_MalTara	2008	0,33	11,25	24,50
_MalTara	2009	0,33	3,88	23,99
_MalTara	2010	0,34	5,32	28,43
_MalTara	2011	0,33	4,52	27,81
_MalTara	2012	0,34	3,29	27,81
_Papua	2007	0,30	10,35	26,53
_Papua	2008	0,31	12,55	26,92
_Papua	2009	0,35	1,92	25,29
_Papua	2010	0,38	4,48	28,78
_Papua	2011	0,40	3,40	30,22
_Papua	2012	0,43	4,52	30,09
_PapBar	2007	0,41	8,13	24,04
_PapBar	2008	0,40	20,03	23,85
_PapBar	2009	0,38	5,06	24,56
_PapBar	2010	0,41	6,40	26,05
_PapBar	2011	0,42	2,27	26,57
_PapBar	2012	0,44	5,00	26,60

### Data Olah Eviews 2

PROV	GNI						2007
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
_Aceh	0,268	0,27	0,29	0,30	0,33	0,32	7,59
_SumUt	0,307	0,31	0,32	0,35	0,35	0,33	7,31
_SumBar	0,305	0,29	0,30	0,33	0,35	0,36	6,38
_Riau	0,323	0,31	0,33	0,33	0,36	0,40	7,53
_KepRi	0,306	0,28	0,27	0,30	0,34	0,34	4,84
_Jambi	0,316	0,30	0,31	0,34	0,34	0,40	7,42
_SumSel	0,338	0,33	0,30	0,37	0,36	0,35	8,21
_Bangka	0,390	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36	2,64
_Bgklu	0,259	0,26	0,29	0,30	0,30	0,29	5,00
_Lmpg	0,302	0,30	0,29	0,29	0,32	0,35	6,58
_DKI	0,336	0,33	0,36	0,36	0,44	0,42	6,04
_JaBar	0,344	0,35	0,36	0,36	0,41	0,41	6,94
_Banten	0,326	0,31	0,32	0,34	0,38	0,38	6,31
_JaTeng	0,366	0,36	0,38	0,41	0,40	0,43	6,26
_DIY	0,337	0,33	0,33	0,34	0,37	0,36	7,99
_JaTim	0,365	0,34	0,37	0,42	0,40	0,39	6,57
_Bali	0,333	0,30	0,31	0,37	0,41	0,43	5,91
_NTB	0,328	0,33	0,35	0,40	0,36	0,35	8,76
_NTT	0,353	0,34	0,36	0,38	0,36	0,36	8,44
_KalBar	0,309	0,31	0,32	0,37	0,40	0,38	8,56
_KalTeng	0,297	0,29	0,29	0,30	0,34	0,33	7,76
_KalSel	0,341	0,33	0,35	0,37	0,37	0,38	7,78
_KalTim	0,334	0,34	0,38	0,37	0,38	0,36	8,22
_SulUt	0,324	0,28	0,31	0,37	0,39	0,43	10,13
_Grtalo	0,320	0,33	0,34	0,37	0,38	0,40	7,02
_SulTeng	0,370	0,36	0,39	0,40	0,41	0,41	8,13
_SulSel	0,353	0,33	0,36	0,42	0,41	0,40	5,71
_SulBar	0,388	0,34	0,35	0,43	0,46	0,44	5,91
_SulTra	0,310	0,31	0,30	0,36	0,34	0,31	7,53
_Maluku	0,328	0,31	0,31	0,33	0,41	0,38	5,85
_MalTara	0,332	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	10,43
_Papua	0,299	0,31	0,35	0,38	0,40	0,43	10,35

_PapBar	0,412	0,40	0,38	0,41	0,42	0,44	8,13
---------	-------	------	------	------	------	------	------

INF					INV					
2008	2009	2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
12,02	3,72	5,86	3,43	0,22	25,95	24,72	25,10	25,13	26,86	28,18
11,66	0,91	7,61	5,38	4,11	28,83	28,21	28,36	28,46	29,77	29,80
11,05	2,33	8,00	3,67	3,86	27,15	26,63	28,20	25,70	27,84	28,11
11,66	1,37	7,00	5,09	3,35	29,93	29,58	28,85	28,23	29,87	30,44
8,08	1,65	4,49	2,97	2,38	27,11	28,24	28,59	28,14	28,84	29,29
11,57	2,49	10,52	2,72	4,22	29,22	28,16	28,50	27,05	28,47	28,72
11,15	1,85	5,88	3,84	2,68	28,67	28,12	27,59	28,86	29,44	29,99
18,40	2,17	9,36	5,00	6,57	26,51	23,75	27,39	26,01	28,24	27,73
13,44	2,88	9,08	3,96	4,61	24,77	25,70	26,09	26,18	26,77	26,57
14,82	4,18	9,95	4,24	4,30	27,92	28,02	27,05	27,03	28,07	27,97
12,54	3,39	6,13	2,97	4,25	31,51	32,34	29,93	31,76	31,60	31,51
11,11	2,34	6,21	3,97	4,52	30,80	31,10	31,67	31,07	31,46	31,58
11,97	2,75	6,45	3,08	3,51	29,68	29,61	30,75	30,61	30,81	31,08
11,94	3,62	6,63	2,69	3,88	27,83	28,67	30,40	27,91	29,10	29,73
10,53	3,38	6,84	3,75	4,65	24,43	26,02	27,43	24,71	23,87	27,78
9,88	2,93	7,38	3,88	4,31	30,50	29,68	29,11	30,81	30,70	31,41
9,25	4,37	8,10	3,75	4,71	26,92	27,54	29,02	28,67	29,18	29,68
13,68	3,61	8,71	6,78	3,85	25,33	26,01	28,40	28,96	29,08	29,45
13,27	5,85	9,22	5,45	5,79	22,07	23,46	24,03	24,26	24,65	25,31
11,92	3,03	7,81	5,81	5,41	26,70	27,25	27,04	28,63	29,41	29,53
10,27	2,12	9,51	4,44	5,71	27,79	27,94	28,18	29,76	29,75	29,89
11,62	3,86	9,06	3,98	5,96	27,58	27,11	27,54	28,97	29,15	29,45
14,61	4,95	7,43	6,37	5,73	28,26	26,80	28,16	30,50	30,12	30,86
9,71	2,31	6,28	0,67	6,04	27,30	26,79	27,41	28,39	28,48	27,75
15,28	4,60	3,87	5,09	5,23	23,40	23,73	27,04	23,90	25,55	26,95
10,40	5,73	6,40	4,47	5,87	27,04	25,28	25,55	27,97	29,42	29,76
11,66	1,78	5,12	4,91	3,28	27,11	27,98	27,79	29,60	29,20	29,70
14,23	3,91	5,83	2,94	3,95	26,27	26,48	27,72	27,79	26,32	26,16
9,20	4,35	7,43	4,08	5,31	27,38	23,36	26,37	25,70	26,09	27,86
12,16	6,48	8,78	2,85	6,73	21,73	23,58	24,25	23,99	25,39	25,17
11,25	3,88	5,32	4,52	3,29	22,99	24,50	23,99	28,43	27,81	27,81
12,55	1,92	4,48	3,40	4,52	26,53	26,92	25,29	28,78	30,22	30,09
20,03	5,06	6,40	2,27	5,00	24,04	23,85	24,56	26,05	26,57	26,60



**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2006 - 2012 (Persen)**

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
11. Aceh	-2,36	-5,24	-5,51	2,74	4,84	5,14
12. Sumatera Utara	6,90	6,39	5,07	6,42	6,63	6,22
13. Sumatera Barat	6,34	6,88	4,28	5,94	6,26	6,38
14. Riau	3,41	5,65	2,97	4,21	5,04	3,54
15. Jambi	6,82	7,16	6,39	7,35	8,54	7,44
16. Sumatera Selatan	5,84	5,07	4,11	5,63	6,50	6,01
17. Bengkulu	6,46	5,75	5,62	6,10	6,46	6,60
18. Lampung	5,94	5,35	5,26	5,88	6,43	6,53
19. Kep. Bangka Belitung	4,54	4,60	3,74	5,99	6,50	5,73
21. Kepulauan Riau	7,01	6,63	3,52	7,19	6,66	6,82
31. DKI Jakarta	6,44	6,23	5,02	6,50	6,73	6,53
32. Jawa Barat	6,48	6,21	4,19	6,20	6,51	6,28
33. Jawa Tengah	5,59	5,61	5,14	5,84	6,03	6,34
34. DI Yogyakarta	4,31	5,03	4,43	4,88	5,17	5,32
35. Jawa Timur	6,11	5,94	5,01	6,68	7,22	7,27
36. Banten	6,04	5,77	4,71	6,11	6,38	6,15
51. Bali	5,92	5,97	5,33	5,83	6,49	6,65
52. Nusa Tenggara Barat	4,91	2,82	12,14	6,35	-2,69	-1,10
53. Nusa Tenggara Timur	5,15	4,84	4,29	5,25	5,62	5,41
61. Kalimantan Barat	6,02	5,45	4,80	5,47	5,98	5,81
62. Kalimantan Tengah	6,06	6,17	5,57	6,50	6,77	6,69
63. Kalimantan Selatan	6,01	6,45	5,29	5,59	6,12	5,72
64. Kalimantan Timur	1,84	4,90	2,28	5,10	4,09	3,98
71. Sulawesi Utara	6,47	10,86	7,85	7,16	7,39	7,86
72. Sulawesi Tengah	7,99	7,78	7,71	8,74	9,12	9,24
73. Sulawesi Selatan	6,34	7,78	6,23	8,19	7,61	8,39
74. Sulawesi Tenggara	7,96	7,27	7,57	8,22	8,96	10,41
75. Gorontalo	7,51	7,76	7,54	7,63	7,68	7,71
76. Sulawesi Barat	7,43	12,07	6,03	11,89	10,32	9,01
81. Maluku	5,62	4,23	5,44	6,47	6,06	7,81
82. Maluku Utara	6,01	5,99	6,07	7,95	6,40	6,67
91. Papua Barat	6,95	7,84	13,87	28,47	27,01	15,90
94. Papua	4,34	-1,40	22,22	-3,19	-5,32	1,08
<b>Jumlah 33 Provinsi</b>	<b>5,67</b>	<b>5,74</b>	<b>4,77</b>	<b>6,14</b>	<b>6,35</b>	<b>6,28</b>

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2000 - 2013 (Miliar Rupiah)**

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
11. Aceh	71093,36	73547,55	71986,95	79145,28	87530,42	95074,22
12. Sumatera Utara	181819,74	213931,70	236353,62	275056,51	314372,44	351090,36
13. Sumatera Barat	59799,05	70954,52	76752,94	87226,62	98966,99	110179,65
14. Riau	210002,56	276400,13	297173,03	345773,81	413706,12	469073,02
15. Jambi	32076,68	41056,48	44127,01	53857,69	63409,98	72634,07
16. Sumatera Selatan	109895,71	133664,99	137331,85	157735,04	182390,49	206297,63
17. Bengkulu	12874,34	14915,89	16385,36	18600,12	21241,86	24119,36
18. Lampung	60921,97	73719,26	88934,86	108404,27	127908,26	144639,48
19. Kep. Bangka Belitung	17895,02	21421,34	22997,90	26712,97	30483,95	34458,59
21. Kepulauan Riau	51826,27	58575,00	63892,94	71614,51	80237,79	90568,21
31. DKI Jakarta	566449,36	677044,74	757696,59	861992,09	982533,60	1103692,66
32. Jawa Barat	526220,23	633283,48	689841,31	771593,86	862234,65	949761,26
33. Jawa Tengah	312428,81	367135,95	397903,94	444666,01	498763,82	556483,73
34. DI Yogyakarta	32916,74	38101,68	41407,05	45625,59	51785,15	57031,75
35. Jawa Timur	536981,88	621391,67	686847,56	778564,24	884502,65	1001200,74
36. Banten	122843,95	139864,78	152556,22	171747,59	192381,29	213197,79
51. Bali	44003,38	51916,17	60292,24	67194,24	74029,80	83943,33
52. Nusa Tenggara Barat	33522,23	35314,73	44014,62	49631,65	49063,44	49679,69
53. Nusa Tenggara Timur	19136,98	21655,87	24179,41	27746,33	31218,75	35248,49
61. Kalimantan Barat	43540,87	49132,97	54281,17	60541,58	66915,62	74969,66
62. Kalimantan Tengah	27931,95	32760,17	37161,80	42571,11	49047,54	55885,58
63. Kalimantan Selatan	39438,77	45843,79	51460,18	59823,07	68186,88	75893,97
64. Kalimantan Timur	222628,92	314813,52	285590,82	321764,43	391761,38	419507,23
71. Sulawesi Utara	24081,13	28697,76	33033,61	36809,00	41831,45	47198,30
72. Sulawesi Tengah	23218,71	28727,51	32461,33	37314,37	44312,22	51106,07
73. Sulawesi Selatan	69271,92	85143,19	99954,59	117862,21	137519,77	159859,93
74. Sulawesi Tenggara	17953,07	22202,85	25655,94	28376,58	32113,04	36600,75
75. Gorontalo	4760,70	5906,74	7069,05	8056,51	9153,67	10368,80
76. Sulawesi Barat	6192,79	8296,61	9403,38	10985,15	12883,96	14407,64
81. Maluku	5698,80	6269,96	7069,64	8084,81	9599,09	11468,77
82. Maluku Utara	3160,04	3862,24	4691,16	5389,83	6038,66	6918,43
91. Papua Barat	10367,28	13975,13	18144,49	26873,09	36176,19	43204,82
94. Papua	55380,45	61516,24	76886,68	87733,42	76501,34	77396,09
<b>Jumlah 33 Provinsi</b>	<b>3556333,63</b>	<b>4271044,59</b>	<b>4653539,25</b>	<b>5295073,58</b>	<b>6028802,27</b>	<b>6733160,11</b>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**FAHMI ARDIANSYAH**, anak laki-laki dari pasangan H. Nasri dan Hj. Aisyah Asri, kelahiran Jakarta, 21 Juni 1992, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Ia bertempat tinggal di Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.

Peneliti memulai pendidikan pada tingkat sekolah dasar di SD Swasta Cempaka Ria, Jakarta Pusat selama 6 tahun dan dilanjutkan dengan memasuki SMPN 77 Jakarta Pusat selama 3 tahun selanjutnya menjajaki pendidikan yang lebih tinggi di SMAN 27 Jakarta Pusat hingga lulus dalam waktu tiga tahun dan selanjutnya memasuki bangku perkuliahan dengan menjadi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Koperasi Jurusan Ekonomi & Administrasi UNJ.

Selama perkuliahan, peneliti pernah aktif menjadi anggota futsal FE UNJ (2010-2012).

Peneliti juga pernah mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank Mandiri Persero, Tbk pada bagian marketing dan melakukan Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) di SMA Negeri 80 Jakarta.